**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI DALAM PROFESIONALITAS GURU: STUDI KASUS DI SALAH SATU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

****

**TESIS**

**Oleh:**

**SITI BADRIAH**

**P2A221006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI DALAM PROFESIONALITAS GURU: STUDI KASUS DI SALAH SATU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

****

**TESIS**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Pada Program Studi Manajemen Pnedidikan**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Jambi**

**Oleh:**

**SITI BADRIAH**

**P2A221006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

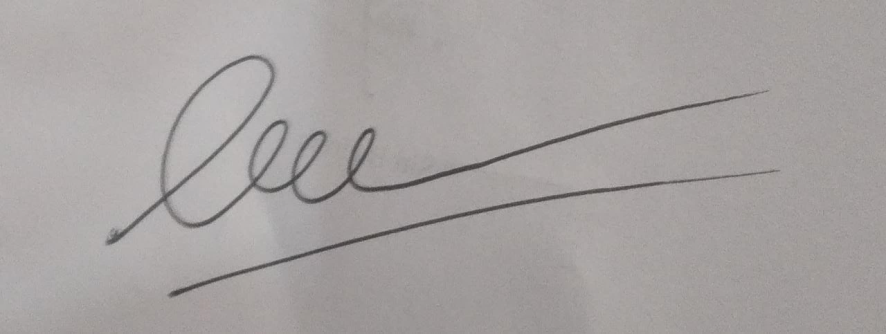
**UNIVERSITAS JAMBI**

**2022**

# HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Tesis yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru studi kasus: di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi*” yang disusun oleh : Siti Badriah, Nomor Induk Mahasiswa PA221006, disetujui pembimbing untuk diujikan.

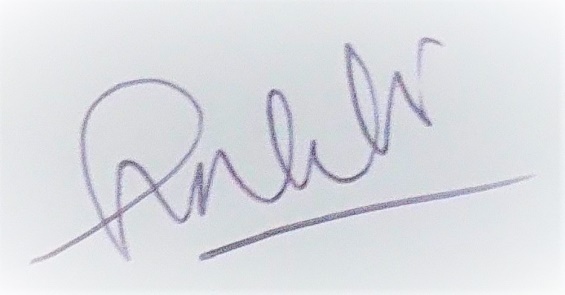
Jambi, 03 Januari 2023

Pembimbing I

Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed.,Ph,D.

Nip. 197501172003121003

Jambi, 03 Januari 2023

Pembimbing II

Akhmad Habibi, Ph.D

Nip. 198309252008121003

# HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru studi kasus: di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi** yang disusun oleh :

Nama : Siti Badriah

NIM : P2A221006

Jenjang Pendiidkan : Strata Dua (S2)

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji pada sidang Ujian Tesis Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Pada tanggal 03 Januari 2023.

Jambi, 03 Januari 2023

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed.,Ph,D. Akhmad Habibi, Ph.D

Nip. 198309252008121003 Nip. 197501172003121003

Mengesahkan

Ketua Program Studi

Magister Manajemen Pendidikan

**Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I, M.Pd.I**

**Nip. 198110062008121002**

# PERNYATAAN

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI DALAM PROFESIONALITAS GURU STUDI KASUS DI SALAH SATU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUARO JAMBI.

Nama : Siti Badriah

NIM : P2A221006

Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan

Konstentrasi : Kebijakan Pendidikan

Tanggal : 03 Januari 2023

Merupakan hasil karya saya dengan bimbingan Komisi Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.

Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada program sejenis di perguruan tinggi. Semua informasi, data, dan hasil pengolahan yang digunakan, telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Jambi, 03 Januari 2023

Siti Badriah

# MOTTO

*“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur”. QS Yusuf: 87*

*"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." - QS Ar Rad 11*

# PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang tua ku

Ayahanda H. Effendi, dan Ibunda Hj. Rita Warlena

Juga kepada Suami tercinta Muhammad Freddy Yuniardy

dan anak ku tersayang Muhammad Arkha Alzahir

Teman teman terbaiku Dr. Siti Rahma Sari, S.pd, M.Pd, Ayu Rhahmayanti,

Dea Chairyani, Moni Lukita, Tiara Ayu Lestari dan Kak Shella Andriani

Terima kasih untuk do’a, dukungan dan motivasi serta restu dalam setiap

gerak langkah ku.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Tesis yang berjudul : “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Dalam Profesionalitas Guru Studi Kasus Di salah Satu Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Muaro Jambi.”* Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda H. Effendi, Ibunda Hj. Rita Warlena, Suami Muhammad Freddy Yuniardy, S.E dan putra Muhammad Arkha Alzahir yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang yang tiada henti. Kemudian juga tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendiidkan khususnya untuk Prodi Magister Manajemen Pendidikan yang sangat banyak membantu dan memfasilitasi perkuliahan sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk penulis kedepannya.

Penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis berikan kepada Bapak Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed.,Ph,D. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Akhmad Habibi, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Penelitian Tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Salam hangat dan penuh cinta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal Penelitian ini. Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya dan kepada pembaca khususnya.

Jambi, 03 Januari 2023

Penuis

Siti Badriah, S.Pd

**ABSTRAK**

**BADRIAH, SITI (2022)** *Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru studi kasus: di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi. Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed.,Ph,D. Akhmad Habibi, Ph.D*

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Sertifikasi, Profesionalitas Guru*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana implementasi kebijakan sertifikasi ini berpengaruh dalam meningkatkan profesionalitas guru yang ada di Salah satu Sekolah Menengah pertama di Kabupaten Muaro Jambi, dan menjelaskan apa saja peran sertfiikasi ini dalam meningkatkan profesionalitas guru sehingga dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi yang mana untuk lokasinya berada di Kecamatan Taman Rajo Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Tenik analisis penyajian data dimulai dari pengumpulan seluruh data hasil obeservasi dan wawancara. Dialnjutkan dengan reduksi data, penyajian data dan ditarik kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan Triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi kebijakan sertifikasi sudah berjalan cukup baik disekolah tersebut hal ini dibuktikan dengan setiap guru yang bersertifikasi sudah memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial dalam menjalankan tugasnya sehari hari dalam menunjukan keprofesionalitasannya. Namun terkait kebijakan sertifikasi sendiri untuk memenuhi beban mengajar guru yang mana dalam kebijakan sertifikasi, untuk guru yang akan diberikan tunjangan sertifikasi harus memenuhi jam mengajar sebanyak 24 jam, pihak sekolah mengalami kesulitan dikarenakan mengingat keadaan sekolah dengan tipe menengah dnegan jumlah siswa kurang dari 200 peserta didiik dan memiliki rombel sebanyak 8 rombel sehingga ada bebarapa guru yang harus mencari tambahan mengajardiluar sekolah induk atau mengambil tugas tambahan diluar mengajar. Terkait dengan peran kebijakan sertifikasi terhadap profesionalitas guru, dirasakan bahwa dengan adanya kebijakan sertifikasi selain guru merasakan kesejahteraan sosialnya meningkat, guru juga diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, namun hal lain yang belum dirasa maksimal yaitu terkait pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum lengkap di sekolah, Karena di era abad 21 ini selain guru yang profesional juga peran sekolah harus mendukung dengan menyedikan sarana prasarana yang mendukung keberlangsungan pembelajaran yang baik. Menyikapi hal tersebut adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu pihak sekolah melengkapi sarana prasarana untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran juga memberika masukan kepada instansi terkait mengenai kebijakan sertifikasi, mengenai beban kerja guru untuk sekolah dengan tipe menengah yang memiliki rombel 8 dan siswa kurang dari 200 dapat dipertimbangkan kembali untuk beban kerja gurunya agar pelaksanaan tugas sebagai guru bisa berjalan dengan maksimal.

**ABSTRACT**

BADRIAH, SITI (2022) Implementation of Certification Policy in Teacher Professionalism case study: in one of the Junior High Schools in Muaro Jambi Regency. Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed.,Ph,D. Akhmad Habibi, Ph.D

Keywords : Implementation of Certification Policy, Teacher Professionalism

This study aims to describe the extent to which the implementation of this certification policy has an effect in improving the professionalism of teachers in one of the junior high schools in Muaro Jambi Regency, and explain what are the roles of this certification in improving teacher professionalism so that it can be used as information and consideration for policymakers.

This research was carried out at one of the Junior High Schools in Muaro Jambi Regency which for its location is in Taman Rajo District, Kemingking Village in Muaro Jambi Regency with a qualitative approach with the type of case study research. Data collection techniques in this study used interviews and observations. The analysis of data presentation starts from the collection of all data from observations and interviews. It is followed by data reduction, data presentation and conclusions drawn. Meanwhile, the data validity test uses data triangulation.

The results of this study indicate that the implementation of the certification policy has been going quite well in this school. This is evidenced by every certified teacher already having 4 competencies that must be possessed by teachers, namely Pedagogic, Personality, Professional and Social Competence in carrying out their daily duties in demonstrating their professionalism. However, regarding the certification policy itself to fulfill the teacher's teaching load, in the certification policy, teachers who will be given certification allowances must fulfill 24 hours of teaching hours. and has 8 classes so that there are several teachers who have to look for additional teaching outside the main school or take on additional assignments outside of teaching. Regarding the role of the certification policy on teacher professionalism, it is felt that with the existence of a certification policy apart from teachers feeling that their social welfare has increased, teachers are also given the opportunity to improve their competence, but other things that have not been felt optimally are related to the use of incomplete facilities and infrastructure in schools, because In the era of the 21st century, apart from being a professional teacher, the role of the school must be to support by providing infrastructure that supports the continuity of good learning. In response to this, the solution that can be done is that the school completes the infrastructure so that it can be used and utilized in the learning process and also provides input to relevant agencies regarding certification policies, regarding teacher workload for medium-type schools that have class 8 and students less than 200 can be reconsidered for the teacher's workload so that the implementation of duties as a teacher can run optimally.

# DAFTAR ISI

[HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN i](#_Toc124239488)

[HALAMAN PENGESAHAN ii](#_Toc124239489)

[PERNYATAAN iii](#_Toc124239490)

[MOTTO iv](#_Toc124239491)

[PERSEMBAHAN v](#_Toc124239492)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc124239493)

[DAFTAR ISI ix](#_Toc124239494)

[BAB I 1](#_Toc124239495)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc124239496)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc124239497)

[1.2 Pertanyaan Penelitian 4](#_Toc124239498)

[1.3 Tujuan Penelitian 4](#_Toc124239499)

[1.4 Asumsi Penelitian 4](#_Toc124239500)

[1.5 Manfaat Penelitian 5](#_Toc124239501)

[1.6 Batasan Penelitian 5](#_Toc124239502)

[1.7 Definisi Istilah 6](#_Toc124239503)

[BAB II 7](#_Toc124239504)

[LANDASAN TEORI 7](#_Toc124239505)

[2.1 Kerangka Pemikiran 7](#_Toc124239506)

[2.2 Landasan Teori 9](#_Toc124239507)

[2.2.1 Implementasi 9](#_Toc124239508)

[2.2.2 Kebijakan 10](#_Toc124239509)

[2.2.3 Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru 12](#_Toc124239510)

[2.2.4 Sertifikasi Guru 13](#_Toc124239511)

[2.2.5 Peran Sertifikasi Guru 21](#_Toc124239512)

[2.2.6 Profesionalitas Guru 22](#_Toc124239513)

[2.3 Hasil penelitian yang relevan 33](#_Toc124239514)

[BAB III 49](#_Toc124239515)

[METODOLOGI PENELITIAN 49](#_Toc124239516)

[3.1 Metode dan Rancangan Penelitan 49](#_Toc124239517)

[3.2 Lokasi Penelitian dan Akses 50](#_Toc124239518)

[3.3 Prosedur Sampling dan Peserta Penelitian 50](#_Toc124239519)

[3.4 Prosedur Pengumpulan Data 51](#_Toc124239520)

[3.5 Kredibilitas Data dan Etika Penelitian. 54](#_Toc124239523)

[3.6 Analisis Data 55](#_Toc124239524)

[3.7 Penyajian Hasil 56](#_Toc124239527)

[BAB IV 57](#_Toc124239528)

[HASIL DAN PEMBAHASAN 57](#_Toc124239529)

[4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 57](#_Toc124239530)

[4.2 Deskripsi Informan Penelitian 58](#_Toc124239534)

[4.3 Hasil Penelitian 63](#_Toc124239535)

[4.4 Pembahasan 104](#_Toc124239541)

[BAB V 109](#_Toc124239542)

[PENUTUP 109](#_Toc124239543)

[A. Kesimpulan 109](#_Toc124239544)

[B. Saran 110](#_Toc124239545)

[DAFTAR PUSTAKA 112](#_Toc124239546)

[LAMPIRAN A 115](#_Toc124239547)

[LAMPIRAN B 116](#_Toc124239548)

[LAMPIRAN C 117](#_Toc124239549)

[LAMPIRAN D 121](#_Toc124239550)

[LAMPIRAN E 122](#_Toc124239551)

[LAMPIRAN F 125](#_Toc124239552)

[LAMPIRAN G 126](#_Toc124239553)

[DOKUMENTASI KEADAAN SEKOLAH 128](#_Toc124239554)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memang salah satu syarat utama tercapainya pendidikan yang bermutu adalah profesionalisme guru. Dan sebagai hasilnya, pemerintah melakukan upaya yang disengaja untuk meningkatkan tingkat profesionalisme guru di tanah air.

Sebagai implementasi dari pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga Jurnal Administrasi Publik 87 Profesional yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen, yang substansinya mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 2 UU No.14 Tahun 2005 disebutkan : (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal; (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan sertifikasi guru akan memungkinkan atau meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu, sejauh mana profesionalisme guru dapat diwujudkan atau ditingkatkan harus menjadi ukuran seberapa baik aturan sertifikasi guru diterapkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa standar kinerja yang dipenuhi guru sesuai dengan kebijakan sertifikasi ini cenderung hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan belum menjadi penanda budaya kerja profesional. Alhasil, banyak juga yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di bidang pendapatan tambahan, namun masih ada beberapa persoalan dengan kompetensi dan profesionalisme. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) yang mana dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta*” Ditemukan bahwa kebijakan sertifikasi tidak banyak berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Kebijakan sertifikasi tampaknya dilaksanakan dengan sikap guru yang secara eksklusif mengutamakan kesejahteraan mereka sendiri, kurang memperhatikan efektivitas pengajaran mereka. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad dan Sujianto (2022) dengan judul “*Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru*” menemukan bahwa berbagai faktor, antara lain (1) Mengenai persiapan dan perencanaan, proses penilaian pembelajaran, termasuk dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Guru, siswa, dan sekolah belum melakukan persiapan yang cukup baik; (2) metode ceramah, diskusi, out class, dan bermain masih digunakan sebagai metode pengajaran utama. Selain itu, adanya guru yang tidak bersertifikat, jam mengajar yang berkurang, dan kecemburuan sosial di masyarakat akibat sertifikasi guru.

Peneliti juga melakukan pra observasi di awal, yang mana ditemukannya laporan dari beberapa stakeholder pada lokasi yang dijadikan lokasi penelitian bahwa disekolah tersebut masih terdapat beberapa guru yang sudah menerima sertifikat pendidik namun dalam segi profesionalitasnya sampai saat ini tidak ada peningkatan yang signifikan, pemenuhan kebijakan sertifikasi dilakukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi semata namun dalam sisi profesionalitasnya masih banyak yang harus dipertanyakan dan dikembangkan.

Berangkat dari beberapa penelitian yang relevan dan temuan di lokasi yang dijadikan tempat penelitian melalui hasil pra-observasi terkait, implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam profesionalitas guru ini, dirasa perlu untuk peneliti lakukan agar dapat menganalisis sejauh mana kebijakan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru dan mengetahui apa peranan sertifikasi di dalam meningkatkan profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi, karena masih banyak hal-hal yang perlu ditelitih atau ke depannya perlu diperbaiki jika memang masih terdapat ke tidak sesuaian atau permasalahan . Dengan adanya kebijakan sertifikasi dan guru yang sudah bersertifikasi dan dinyatakan profesional dengan dikeluarkannya sertifikat diharapkan dapat terus mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas pendidikan dan instruksional, termasuk keterampilan kepribadian, keterampilan manajemen, pembelajaran siswa, keterampilan penguasaan materi pelajaran, serta keterampilan sosial dan komunikasi dan berhubungan secara efektif dengan siswa. (Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK Depdiknas, 2005).

### 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Apa peran sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis apa saja peranan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru yang telah dirasakan guru hingga saat ini yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perhatian bagi pengambil kebijakan.

### 1.4 Asumsi Penelitian

Berdasarkan observasi awal, peneliti menerima informasi dari stakeholder terkait implementasi kebijakan sertifikasi ini terhadap peningkatan profesionalitas, sebagian guru yang menerima sertifikasi sudah mengalami peningkatan, namun juga masih terdapat guru yang belum terlihat peningkatan dalam hal profesionalitasnya. Untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi terhadap peningkatan profesionalitas guru di sekolah yang di teliti.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
2. Untuk membuka wawasan dan memberikan gambaran objektif tentang implementasi kebijakan sertifikasi yang ditinjau dari sudut pandang pelaksanaan.
3. Untuk menambah hasil kajian tentang implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya.
4. Secara praktis
5. Sebagai bahan informasi bagi sekolah dan pihak lain yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.
6. Sebagai masukan bagi stakehodler dalam merumuskan dan membuat kebijakan dalam bidang pendidikan

### 1.6 Batasan Penelitian

Pada penelitian yang diusulkan ini terdapat batasan penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Dalam penelitian yang akan terlibat menjadi partisipan yaitu wakil kepala sekolah, guru yang telah memperoleh sertifikasi, tim supervisi sekolah dan siswa.

Namun dalam hal ini, yang menjadi partisipan utama yaitu guru yang memperoleh sertifikasi karena yang merasakan dampak dari penerimaan sertifikasi ini adalah guru tersebut. Sedangkan partisipan lain, informasi yang didapatkan digunakan sebagai data pendukung.

### 1.7 Definisi Istilah

***Sertifikasi guru*** dalam hal ini yaitu tata cara penyerahan sertifikat pendidik kepada guru. Guru yang telah memenuhi persyaratan guru profesional diberikan sertifikasi pendidik. Untuk mengembangkan sistem dan praktik pendidikan yang sangat efektif, seorang guru yang terampil adalah suatu keharusan.

***Kebijakan*** memiliki makna yaitu mengacu pada metode yang digunakan oleh berbagai cabang pemerintahan untuk mengelola kegiatan sehari-hari mereka. Dalam hal ini, kebijakan adalah pola formal yang disetujui oleh pemerintah atau lembaga sehingga mereka dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini terkait dengan konsep regulasi organisasi.

***Profesionalitas*** dalam penelitian ini yaitu perilaku orang-orang di lapangan yang benar-benar bertanggung jawab dan yang dengan tulus menghargai profesinya. Selain itu, istilah "profesionalisme" mengacu pada cara di mana individu dari suatu profesi berperilaku terhadap bidang pekerjaan mereka serta tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban mereka.

# BAB II

## LANDASAN TEORI

### 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian , kerangka pemikiran merupakan hal yang penting karena berfungsi sebagai acuan dalam mencapai tujuan penelitian juga sebagai batasan penelitian agar peneliti lebih terfokus dengan apa yang akan disajikan. Dalam hal ini, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi serta mengevaluasi pelaksanaannya juga menganalisis apa saja peranan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru yang mana sudah berjalan sampai saat ini yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan juga pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

Berikut ini merupakan bagan yang akan mendeskripsikan kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujaun pendidikan nasional. Dan sebagai syarat guru penerima sertifikasi yaitu :

1. Punya sertifikat pendidik.
2. Berstatus sebagai guru ASN/ Non ASN di daerah di bawah kementerian.
3. Mengajar di satuan pendidikan yang tercatat dalam data Dapodik.
4. Mempunyai nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian.
5. Mengajar dan/ atau membimbing siswa di satuan pendidikan sesuai peruntukan sertifikat pendidik, dan dibuktikan dengan surat keputusan mengajar.
6. Memenuhi beban kerja, sebagaimana peraturan undang-undang.
7. Mempunyai hasil penilain kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”
8. Mengajar dikelas, sesuai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang disyaratkan menurut bentuk satuan pendidikan.
9. Bukan pegawai tetap instansi lainnya.

Bagi guru ASN lokal yang diangkat sebagai kepala sekolah, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku. Tiga kelompok guru ASN juga dikecualikan dari persyaratan pemenuhan beban kerja. Pengecualian ini berlaku untuk orang yang memperoleh izin atau izin dari pengawas kepegawaian saat terlibat dalam kegiatan pengembangan profesional seperti pendidikan dan pelatihan selama 600 jam atau selama tiga bulan.

Guru ASN di daerah yang mengikuti pertukaran guru, kemitraan, dan/atau pemagangan yang diakui oleh pengawas kepegawaian juga dibebaskan dari tunjangan profesi. tambahan untuk guru ASN yang bekerja di bidang khusus. Guru dianggap sebagai guru profesional setelah menyelesaikan prosedur dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikasi guru, yang ditunjukkan dengan peningkatan profesionalitas pengajar.

### 2.2 Landasan Teori

#### 2.2.1 Implementasi

Sebelum membahas jauh mengenai implementasi kebijakan, baiknya terlebih dahulu memahami makna implementasi. Adapun implementasi adalah kegiatan atau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan secara hati-hati dan menyeluruh. Perencanaan biasanya diselesaikan sebelum memulai implementasi. Usman (2002) mengklaim bahwa implementasi difokuskan pada kegiatan, tindakan, atau bekerjanya suatu sistem; itu bukan hanya suatu kegiatan, tetapi satu yang direncanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi tujuan kegiatan itu.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Bahkan menurut kamus webster dalam Wahab (2004) menyatakan bahwa pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) *berarti to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dengan pengetahuan tersebut, jelaslah bahwa implementasi mengacu pada suatu cara atau usaha yang digunakan untuk melaksanakan suatu pilihan tertentu. Dalam konteks kajian kebijakan publik, makna implementasi ini menyangkut keputusan, konflik, dinamika masyarakat, dan apa yang diperoleh masyarakat dari suatu kebijakan. Termasuk juga penerapan keputusan politik ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan bagian krusial dari keseluruhan proses kebijakan jika menghasilkan definisi implementasi tersebut.

#### 2.2.2 Kebijakan

Secara umum, aturan atau kebijakan digunakan untuk menunjukkan bagaimana seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga tertentu, harus bersikap untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi. Intinya, ada banyak penjelasan dengan batasan atau interpretasi kebijakan yang berbeda.

Noeng Muhadjir mengklaim bahwa kebijakan adalah upaya untuk mengatasi masalah sosial untuk kebaikan masyarakat berdasarkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan manusia. Lebih lanjut, kebijakan tersebut setidaknya harus mencapai empat tujuan utama: (1) peningkatan kualitas kehidupan masyarakat; (2) terjadinya keadilan yang berkaitan dengan hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi; (3) pemberian kesempatan partisipasi aktif masyarakat (dalam pemecahan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan); dan (4) pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa yunani, yaitu “polis” yang artinya kota (*city*). (Heinz weihrich and Haraoid Koontz,1993). Pendapat ini menjelaskan, kebijakan adalah pedoman yang digunakan pemerintah secara keseluruhan untuk menjalankan operasinya. Dalam situasi ini, kebijakan merupakan pola formal yang sama-sama diakui oleh pemerintah atau lembaga sehingga mereka dapat menggunakannya untuk mencapai tujuannya. Ini berhubungan dengan ide regulasi organisasi.

Menurut Wahab (2005), Suatu kegiatan sanksi yang menghasilkan tujuan tertentu dan ditujukan pada masalah tertentu yang saling terkait yang mempengaruhi mayoritas individu dikenal sebagai kebijakan publik.

Kemudian menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono,2005) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilik kerja atau hasil kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah prinsip dan batasan yang luas yang berfungsi sebagai arah tindakan yang diambil dan aturan yang harus dipatuhi oleh aktor dan pelaksana kebijakan karena sangat penting untuk diproses dalam suatu organisasi dan pengambilan keputusan atas rencana. yang telah dibuat dan disepakati bersama. Akibatnya, kebijakan berubah menjadi alat untuk menyelesaikan masalah dengan tindakan yang terjadi. Dan di dalam penelitian ini peneliti akan berfokus kepada implementasi kebijakan itu sendiri yang mana akan bermuara kepada evaluasi kebijakan, yang mana dari hasil penelitian ini ditemukan masukan untuk kebijakan itu sendiri.

#### 2.2.3 Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Peningkatan pertumbuhan profesionalisme guru merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, khususnya dalam pengajaran. Sesuai UU No. 14 Tahun 2005, prosedur sertifikasi guru dan dosen sebagai pendidik berlangsung. Sertifikat pendidik ini berfungsi sebagai bukti hukum bahwa guru dan dosen diakui sebagai profesional. Istilah "sertifikasi" kemudian mengacu pada dokumen yang dikeluarkan untuk suatu profesi oleh badan yang diakui yang berfungsi baik sebagai lisensi untuk mempraktekan perdagangan profesi itu dan sertifikat dari lembaga itu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sertifikasi menggambarkan proses pengakuan profesi tertentu sebagai bukti kelayakan untuk terlibat dalam praktik profesional.

Rekrutmen, pelatihan, status sosial, dan lingkungan kerja semuanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan, kemampuan, kualitas pribadi, kemungkinan karir, dan motivasi yang diperlukan. Penjelasan yang menyoroti fungsi krusial dan fundamental pendidik juga menekankan hal ini, sebagaimana Harris (1990) menyatakan, “*Without substantial continuing growth in competence in personnel (teacher) serving in our elementary and secondary schools, the entire concept of accountability has little meaning.”* Pelaksanaan pendidik yang *acountability* harus dibarengi juga dengan pemberian layanan pendidikan yang bermutu, disamping itu juga harus diikuti dengan kompetensi yang tinggi berasal dari guru. Oleh sebab itu guru dikenal sebagai *the key actor in the learning”.*

#### 2.2.4 Sertifikasi Guru

1. **Pengertian Sertifikasi Guru**

Proses pemberian kredensial pendidik kepada guru dan dosen, serta pembuktian formal yang mengakui mereka sebagai profesional, dikenal dengan sertifikasi. Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mewajibkan guru untuk disertifikasi. Menurut Pasal 61, ijazah dan sertifikat kompetensi merupakan bentuk sertifikasi yang dapat diterima, tetapi bukan sertifikasi yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah termasuk seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Kelulusan ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi yang diakui diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan (Mulyasa, E. 2009).

Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen Bab I pada Ketentuan Umum Pasal 1 diterangkan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.”

Menurut kamus, sertifikasi mengacu pada pernyataan (lisensi) tentang kelayakan profesi untuk melakukan tugas dan sertifikat (sertifikat) dari organisasi resmi yang dikeluarkan untuk jenis profesi. Agar guru dipandang efektif dalam melaksanakan tanggung jawab profesi guru. Guru dan dosen yang telah memenuhi prasyarat diberikan sertifikat pendidik. (Trianto dan Titik,2007)

Menurut pengertian ini, sertifikasi dapat dilihat sebagai suatu prosedur yang mengakui kompetensi seseorang untuk menyelenggarakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah suatu proses uji kompetensi yang dimaksudkan untuk menunjukkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan untuk menerbitkan sertifikasi pendidikan (Mulyasa, E. 2009)

1. **Tujuan dan Manfaat Sertifikasi**

Tujuan sertifikasi guru adalah untuk memastikan tingkat kualifikasi seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan bertindak sebagai agen pembelajaran di lembaga pendidikan, dan untuk memberikan sertifikasi pendidik kepada mereka yang memenuhi persyaratan dan berhasil dalam ujian sertifikasi. (Samani,dkk. 2007)

Menurut Wibowo, yang menulis tentang sertifikasi dalam bukunya Mulyasa, E. 2005, itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas persembahan dan hasil akademik di bidang-bidang berikut:

1. Mempertahankan profesi guru dan fakultas.
2. Mempertahankan masyarakat dan metode yang tidak efektif, yang merusak reputasi pendidik dan anggota staf.
3. Membantu dan melindungi lembaga pendidikan dengan menawarkan standar dan alat untuk mengidentifikasi calon yang memenuhi syarat.
4. Menyediakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Menciptakan persepsi masyarakat yang positif terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan.

Sedangkan pada buku panduan Kemdiknas, adapun tujuan dilaksanakannya sertifikasi guru ini yaitu:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalisme guru

Karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan mendalam apabila direalisasikan maka dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa menurut hemat penulis istilah “sangat besar” jika mengacu pada tujuan dan manfaat sertifikasi memang berarti suatu jumlah yang sangat besar. secara hati-hati dan tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mencapai dan mengoptimalkan tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Landasan Hukum Sertifikasi Guru**

Landasan hukum sertifikasi guru yang mana berdasarkan kutipan dari Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Sertifikasi Guru Rayon 14 UNESA Surabaya dalam websitenya Saifudin, tercantum 8 landasan hukum sertifikasi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
7. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
8. Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
9. **Alur Sertifikasi Guru**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyartan dapat mengikuti sertifikasi melalui :

1. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL)
2. Portofolio (PF)
3. Pendidikan dan Latihan profesi Guru (PLPG)
4. Pendidikan Profesi Guru (PPG)
5. **Prinsip pelaksanaan Sertifikasi Guru**

Menurut Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012, sertifikasi guru dinas pada tahun 2012 diselesaikan berdasarkan rencana penelitian. Berdasarkan klausul tersebut, implementasi konsep sertifikasi guru tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Program studi yang relevan dengan bidang pengajaran instruktur digunakan untuk melengkapi persyaratan sertifikasi guru.
2. Apabila LPTK wilayah dialokasikan untuk melaksanakan sertifikasi guru pada suatu mata pelajaran tetapi tidak menarik program studi yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, maka harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Penunjang (PT Pendukung) yang memiliki bidang studi non kependidikan yang bersangkutan.
3. Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2012: Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG, buku
4. Mengatur lebih lanjut tentang kerja sama antara LPTK wilayah dengan PT pendukung.
5. **Mekanisme Sertifikasi**

Pelaksanaan sertifikasi guru menurut Kunandar (2009), enam prinsip yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan. Pertama, dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan objektif. Fokusnya adalah memastikan proses sertifikasi guru mengikuti Standar Nasional Pendidikan tanpa diskriminasi. Transparan mengacu pada proses sertifikasi, yang memberikan kesempatan kepada pelaku pendidikan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pendidikan dilaksanakan, termasuk input, proses sertifikasi, dan hasilnya. Proses sertifikasi kemudian dapat diselenggarakan pertanggungjawaban secara administratif, finansial, dan akademik kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, guru yang lulus ujian sertifikasi diberikan bonus karir sebesar gaji pokok. Ketiga, dilakukan agar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat juga direncanakan dan dilakukan secara metodis. Kelima, menilai latar belakang profesi guru. Pengalaman meliputi pelatihan, pekerjaan yang dihasilkan, dan kegiatan lain yang meningkatkan profesionalisme seorang guru selain waktu yang dihabiskan seorang guru untuk mengajar. Keenam, untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan serta mutu hasil sertifikasi, pemerintah menetapkan jumlah peserta program sertifikasi guru.

1. Tahap seleksi penetapan peserta

Semua guru PNS dan non-PNS berhak mengikuti ujian sertifikasi selama mereka adalah guru reguler di lingkungan pendidikan tempat mereka ditugaskan dan memenuhi prasyarat, antara lain memiliki gelar atau setidaknya beberapa pelatihan. Ijazah sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV) diperoleh melalui proses yang lambat dan metodis. Untuk masuk dalam daftar calon-calon sertifikasi, instruktur yang sesuai dengan kualifikasi harus mendaftar terlebih dahulu sebagai calon sertifikasi di dinas pendidikan kabupaten/kota. Daftar panjang guru yang memenuhi standar sertifikasi disusun oleh dewan sekolah setempat. Kedua, calon siswa di lembaga pendidikan lokal diurutkan di sini berdasarkan faktor-faktor termasuk masa kerja, usia, kelas (petugas), jumlah guru, tugas tambahan, dan efisiensi kerja. Tahap ketiga, menyeleksi peserta sertifikasi diklat daerah sesuai kuota Dirjen Pembinaan Mutu Pendidikan Tenaga Kerja (PMTK) dan mempublikasikan daftar peserta di papan pesan lingkungan atau forum diskusi. Pusat Pelatihan Perkantoran.

Calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi tetap dipilih dengan menggunakan prosedur tersebut di atas. Selain itu, daripada menggunakan tes seleksi, seleksi dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Persyaratan layanan tahunan seorang guru dihitung pada hari mereka ditetapkan sebagai peserta sertifikasi. Masa bakti guru SD juga menjadi pertimbangan bagi guru PNS yang bukan guru SD PNS tetap. Masa jabatan guru non-PNS dihitung sejak mereka mulai bekerja sebagai guru di lingkungan pendidikan tertentu. Kriteria usia menghitung usia secara kronologis. Persyaratan pangkat dan golongan adalah pangkat dan golongan guru yang berstatus PNS. Jam mengajar mingguan, atau minimal 24 jam kehadiran, digunakan untuk menentukan kriteria beban mengajar. Pekerjaan atau penugasan tambahan, seperti wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan lain-lain, memenuhi persyaratan untuk penugasan tambahan. Standar prestasi kerja termasuk untuk guru yang luar biasa (sukses), disiplin, loyalitas, dan pengabdian, serta dukungan rekan dan siswa untuk berbagai tingkat pujian.

1. Tahap sertifikasi

Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi adalah benar-benar perguruan tinggi dengan program fakultas yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Misalnya, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, yang mengawasi proses pemilihan peserta, memberikan wewenang kepada perguruan tinggi tertentu untuk mengakreditasi guru. Badan sertifikasi kemudian melakukan tes bakat untuk memilih pelatih untuk menyelesaikan prosedur sertifikasi. Uji kompetensi sertifikasi tingkat awal akan melibatkan evaluasi portofolio; ini akan diikuti dengan persiapan guru profesional, yang kemudian akan diganti dengan persiapan guru profesional berkelanjutan. Dua jenis pelatihan profesi guru adalah PPG Prajab dan PPG Daljab.

Harapan kesejahteraan yang lebih baik bagi guru yang lulus sertifikasi mungkin sudah “di atas kertas”. Sebab, pemerintah wajib membayar tunjangan profesi guru yang besarnya satu kali gaji pokok guru dan dibayarkan Januari berikutnya setelah guru dinyatakan lulus. Demikian proses pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia dari segi keilmuan dan teori.

#### Peran Sertifikasi Guru

Berdasarkan UU No. 14 Tahun/2005 pasal 14 ayat 1 adapaun peran serifikasi yaitu memperoleh: 1) penghasilan di atas minimum yang diperlukan untuk penghidupan dan jaminan sosial; 2) promosi dan penghargaan berdasarkan penugasan dan prestasi kerja; 3) perlindungan hak kekayaan intelektual dan kesanggupan melaksanakan tugas; 4) kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; dan 5) akses dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas keprofesian; 6) Bebas mengambil keputusan dan ikut serta dalam menyeleksi peserta didik untuk kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi sesuai dengan kebijakan pendidikan, kode etik guru, dan persyaratan hukum dan peraturan; 7) merasa aman dan terjamin keselamatannya dalam menjalankan tugas; 8) Bebas bergabung dengan organisasi profesi; 9) Diberikan kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan ditetapkan; 10) Diberi kesempatan untuk meningkatkan kredensial dan kompetensi akademik mereka; dan/atau 11) Mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional di bidang keahliannya.

#### Profesionalitas Guru

1. Pengertian Profesionalitas Guru

Kata "profesional" mengacu pada posisi atau karier yang mengharuskan anggotanya memiliki pengetahuan khusus. Sebagai sebuah panggilan, itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak siap untuk tugas tersebut, klaim Wijaya (1994). Kata “profesi” mengacu pada pekerjaan yang memiliki kriteria tertentu. Menurut Fatah (2011), suatu profesi harus memiliki berbagai kompetensi dasar maupun kemampuan khusus, dihormati oleh masyarakat dan pemerintah, serta menjunjung tinggi kode etik.

Evan dalam Azhar Arsyad (2015) menjelaskan bahwa profesionalitas merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Hoyle (1975) yang mengidentifikasikan dua aspek profesional guru secara terpisah yaitu *profesionalitas* dan *profesionalisme.* Pada tahun 1975, Hoyle menggaris bawahi perbedaan antara status hubungan profesional guru, yang ia definisikan sebagai profesionalisme, dan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur yang dibutuhkan guru dalam bidang pekerjaan mereka. Ia juga mendefinisikan profesionalisme sebagai ideologi, sikap, landasan intelektual, dan epistemologi individu, yang juga mempengaruhi pengalaman profesionalnya melalui hubungannya dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2005, prinsip profesionalisme guru adalah: (1) memiliki bakat, minat, vokasi, dan idealisme; (2) komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan; dan (3) iman. Bertakwa dan berakhlak mulia, (3) memiliki pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk jabatan tersebut, (4) bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab profesional, (5) dibayar sesuai dengan seberapa baik mereka melakukan pekerjaannya, (6) memiliki akses seumur hidup kesempatan belajar untuk mengembangkan keprofesiannya lebih lanjut, (7) mendapat jaminan perlindungan hukum selama bekerja, (8) dan terakhir (9) memiliki kewenangan.

Menurut Pasal 7 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 2005, penguatan profesi guru dan dosen dilakukan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan yang berwawasan kemanusiaan, memberikan prioritas hak asasi manusia dan agama, budaya, pluralisme bangsa, dan etika profesi.

Menurut Latiana, L (2019), persyaratan guru profesional dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu persyaratan akademik, administratif, dan personal. Pada persyaratan administrasi merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang guru yang mau menjadi profesional terkait dengan persyaraytan hukum formal. Di Indonesia sendiri, syarat tersebut sangat spesifik. Kualitas seseorang juga dapat di nilai dari ijazah dan sertifikat akademik. Di Indonesia, persyaratan akademik yaitu persyaratan bagi guru yang ingin menjadi profesional dalam hal kemampuan intelektual dan kualitas.

Juga, persyaratan akademik merupakan persyaratan yang sangat penting bagi guru profesional. Persyaratan ini sangat menentukan suatu keberhasilan sebuah proses pelatihan yang dilaksanakan. Kemudian keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab siswa sebagai pencari ilmu, tetapi guru memiliki peran yang dominan. Sebab jika seorang guru secara akademik tidak memadai, maka tentu kemampuannya dalam mendidik kurang maksimal, kemudian pengelolaan mata pelajaran dan evaluasi keberhasilan siswa tidak akan terkontrol dengan baik dan benar. Hal ini tentu dapat merugikan proses pendidikan yang berakibat fatal tidak hanya bagi satu peserta didik tetapi bagi seluruh peserta didik bahkan seluruh peserta pendidikan.

Selanjutnya persayartaan kepribadian dimaknai sebagai persyaratan yang harus dimiliki seorang guru yang ingin bersikap profesional dalam hal berperilaku dan bersikap. Hal ini tidak hanya mengacu pada tradisi, kesopanan dan aturan masyarakat setempat, juga berpengaruh terhadap nilai agama. Tidak ada alasan lain untuk menjadi guru profesional selain berakhlak yang mulia, baik dalam hubungan dengan orang lain (masyarakat dan siswa), diri sendiri, lingkungan dan tentunya Allah SWT.

1. Kompetensi Dasar yang harus dimiliki dalam Profesionalitas Guru

Elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualifikasi guru. Dalam hal aktivitas, perilaku, dan hasil yang harus dibuktikan di tempat kerja, kompetensi pada hakikatnya merupakan gambaran tentang apa yang harus mampu dilakukan oleh seseorang. Tentu saja, memiliki informasi, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan Anda diperlukan agar Anda berhasil dalam karier. (Mujib, 2015)

Gagasan kompetensi sering dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai fundamental yang direpresentasikan dalam kebiasaan berpikir dan berbuat. Spesifikasi pengetahuan, kemampuan, dan sikap seseorang serta penerapannya di tempat kerja sesuai dengan kriteria kinerja yang dituntut oleh lapangan merupakan definisi lain dari kompetensi. Kompetensi guru, dengan demikian, adalah kapasitas dan kewenangan guru untuk melaksanakan tanggung jawab pedagogiknya atau mereka yang mahir melakukannya. (Ma’arif,2011)

Menurut Hamalik dalam Nafis (2010), guru perlu memiliki dan menekankan beberapa dimensi kompetensi yang berbeda, antara lain sebagai berikut: a) Guru harus mampu mengkomunikasikan informasi kepada kelas; b) Guru harus mampu mengelola kelompok siswa; c) Guru harus mampu mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa; d) Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan menciptakan dan menyediakan alat dan bahan pembelajaran; dan e) Guru harus dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat; f) Guru yang berperan sebagai ekspeditor harus mampu meneliti sumber daya lokal yang akan digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Guru yang bertugas sebagai perencana harus mampu memilih dan memadukan bahan pelajaran secara profesional. Guru yang bertugas sebagai pengawas harus dapat memantau kegiatan siswa dan ketertiban kelas. Untuk memotivasi siswa, seorang guru harus memiliki keterampilan yang diperlukan. j) Guru harus memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan tantangan. k) Guru harus memiliki kemampuan untuk mengenali dan memuji siswa yang berhasil, l)Guru yang berperan sebagai evaluator harus mampu mengevaluasi siswa secara objektif, terus menerus, dan menyeluruh; m) Guru yang berperan sebagai konselor harus mampu membantu siswa yang mengalami kesulitan tertentu.

Pemerintah secara bersamaan membuat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Misalnya, pasal IV pasal 8 No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Kompetensi mengajar yang dikomunikasikan dalam pasal 8 juga mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesionalisme yang diperoleh melalui pendidikan profesi, menurut pasal 10 ayat (1). (Direktorat Jenderal pendidikan islam).

Hal ini diatur pula di dalam PP No.19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan pasal 28 yang itu mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial ketika bertindak sebagai agen pembelajaran di pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan keduanya. (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam)

1. Kompetensi Pegagogik

Kemampuan instruktur untuk mengarahkan pembelajaran siswa sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Pengetahuan tentang asas atau dasar pendidikan; 2) Pengetahuan siswa; 3) Pengembangan kurikulum atau silabus 4) Rancangan pembelajaran, 5) Melaksanakan pendidikan DNA dialogis, 6) Menggunakan teknologi pembelajaran, 7) Mengevaluasi hasil belajar, dan 8) Membantu siswa berkembang mencapai potensinya secara maksimal. Mulyasa, E (2012)

Kemampuan mengelola pembelajaran siswa, merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, serta mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang dimilikinya ditetapkan sebagai kompetensi pedagogik dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (3) butir a dokumen.

TABEL 2.1

KOMPETENSI PEDAGOGIK (Sarimaya, 2008)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | SUB KOMPETENSI | INDIKATOR ESENSIAL |
| 1 | Memahami peserta didik | Memahami siswa menggunakan prinsip perkembangan kognitif, memahami siswa menggunakan prinsip kepribadian dan mengenal bahan ajar awal siswa. |
| 2 | Merancang pembelajaran | Memahami dasar-dasar pendidikan, menerapkan teori belajar mengajar, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, keahlian dan bahan ajar yang dapat dicapai, dan mengembangkan rencana pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. |
| 3 | Melaksanakan pembelajaran | Mengatur latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. |
| 4 | Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran | Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. |
| 5 | Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya | Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik |

1. Kompetensi Kepribadian

Dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan untuk berkembang menjadi pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa serta sebagai teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Rincian berikut dapat digunakan untuk menjelaskan sub kompetensi ini:

TABEL 2.2

KOMPETENSI KEPRIBADIAN (Sarimaya, 2008)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Sub Kompetensi | Indikator Esensial |
| 1 | Kepribadian yang mantap dan stabil | Bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai norma sosial, bangga sebagai guru, juga harus memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dnegan norma. |
| 2 | Kepribadian yang dewasa | Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. |
| 3 | Kepribadian yang arif | Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. |
| 4 | Kepribadian yang berwibawa | Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. |
| 5 | Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan | Bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, iklas, jujur, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik |
| 6 | Evaluasi diri dan pengembangan diri | Memiliki kemampuan untuk berintropeksi dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. |

Keberhasilan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian pengajarnya, terutama dalam hal bagaimana pembelajaran dilaksanakan; kompetensi kepribadian mempengaruhi pertumbuhan pribadi siswa. Tugas utama kompetensi kepribadian ini adalah membentuk kepribadian peserta didik, mengembangkan sumber daya manusia, dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara secara keseluruhan. (Mulyasa, E. 2012)

1. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional mengacu pada berbagai kemampuan yang diperlukan untuk bekerja sebagai guru profesional. Seseorang yang memenuhi syarat untuk melakukan tugas guru disebut sebagai guru profesional. Kualifikasi ini penting karena memiliki pengaruh langsung pada seberapa baik kinerja instruktur. (Ma’arif, 2011)

Mengenai Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005, khususnya pada pasal 28 ayat 3 huruf c disebutkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai mata pelajaran secara mendalam dan luas, yang memungkinkan peserta didik dibimbing untuk memenuhi persyaratan. kualifikasi yang ditentukan dalam standar nasional. Rincian berikut dapat digunakan untuk menjelaskan sub-kompetensi:

TABEL 2.3

KOMPETENSI PROFESIONAL (Sarimaya, 2008)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SUB KOMPETENSI** | **INDIKATOR ESENSIAL** |
| 1 | Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi | Memahami bahan ajar sesuai dengan kurikulum sekolah, struktur, konsep dan juga metode ilmiah bahan ajar secara menyeluruh atau kompatibel, memahami interaksi konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari |
| 2 | Menguasai struktur dan metode keilmuan | Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/ materi bidang studi secara profesional dalam konteks global. |

1. Kompetensi Sosial

Kemampuan seorang guru untuk berfungsi secara sosial dan sebagai anggota masyarakat. Salah satu kekuatan atau kemampuan guru untuk membantu siswa menjadi anggota masyarakat yang unggul, serta kemampuan untuk memajukan dan membimbing masyarakat sebelum kehidupan mendatang, adalah memiliki keterampilan bergaul yang baik. (Ma'arif, 2011)

Menurut penjelasan Pasal 28(3) huruf d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi sosial diartikan sebagai kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dalam berinteraksi dengan peserta didik, pendidik, guru, orang tua/wali peserta didik. mahasiswa, dan anggota masyarakat lainnya. Rincian berikut dapat digunakan untuk menjelaskan sub kompetensi ini:

TABEL 2.4

KOMPETENSI SOSIAL (Sarimaya, 2008)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | SUB KOMPETENSI | INDIKATOR ESENSIAL |
| 1 | Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik | Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik |
| 2` | Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan | Berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan |
| 3 | Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar | Berkomunikasi secara efektif dengan orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar. |

1. Kriteria Guru Profesional

Dalam bukunya “Menjadi Guru Profesional”, Mulyasa, E. (2006) menekankan pentingnya profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Mulyasa menekankan perlunya guru yang berkualitas untuk dapat merancang pembelajaran yang menarik. Konjungsi "dan" menyampaikan arti dari dua kata terakhir, "kreatif" dan "menyenangkan". Kata “dan” termasuk dua item yang tidak dapat dipisahkan, menurut penalaran gramatikal. Istilah "kreatif" merujuk pada sesuatu yang unik, berbeda, atau orisinil yang harus dinikmati oleh siswa. Meskipun persyaratan untuk menjadi kreatif dan bersenang-senang tampak mudah, namun sulit untuk diterapkan.

UU Sisdiknas 2003 Pasal 39 (2) menyebutkan, *pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.*

Jika dimiliki oleh seorang guru atau dosen, maka standar profesi yang tercantum di atas sudah lebih dari cukup. Dari perencanaan hingga penilaian, bakat guru adalah kapasitas proses evaluasi untuk mengidentifikasi hasil yang akan dan telah dicapai. Jika ada ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan saat melakukan penelitian merupakan upaya untuk mengatasi kesulitan (rekomendasi pelaksanaan PTK). Setelah akreditasi sebagai guru atau dosen, komponen ini harus aktif menjadi panutan.

### 2.3 Hasil penelitian yang relevan

Dari berbagai penjelasan di atas. Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sertifikasi terhadap Profesionalitas Guru: studi kasus di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi” juga memiliki beberapa acuan atau referensi dari penelitian yang relevan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bactiar Dwi Kurniawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011. Dengan Judul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Yogyakarta”*. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan kajian, implementasi kebijakan sertifikasi guru secara umum berjalan dengan baik dan lancar baik di tingkat Dinas Pendidikan Kota maupun LPTK. Satu-satunya kendala yang dialami keduanya terkait dengan kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini terjadi akibat kegagalan pemerintah pusat dalam menyisihkan dana untuk membantu pelaksanaan program. Dampak sertifikasi terhadap kebijakan belum banyak meningkatkan profesionalisme guru. Sikap guru dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi nampaknya hanya mengutamakan kesejahteraan, dengan sedikit fokus pada efektivitas pengajaran.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul, Muh.Amir dan La Tarifu pada tahun 2022 dengan judul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru di Kabupaten Buton Utara”* Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru dilihat dari tindakan nyata para pelaksana kebijakan sertifikasi dalam menjalankan standar dan tujuan kebijakan, ketiganya telah sesuai dengan parameter implementasi yang telah ditetapkan. , yaitu lembaga pelaksana telah membuat spesifikasi target jangka pendek, proses alokasi tugas hingga batasan usia pelaksana, dan implementasi standar dan tujuan kebijakan.
3. Penelitian yang dilakukan Ratih Fenty Anggriani Bintoro dan Yuli Fitrianto pada tahun 2019 dengan judul “*Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kalimantan Timur (Studi Kasus di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur”*. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Menurut temuan studi tersebut, instruktur yang berkualitas di Kalimantan Timur umumnya memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Tuntutan kinerja yang dipenuhi guru biasanya hanya untuk memenuhi tugas dan belum menjadi indikasi budaya kerja yang profesional. - Peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan motivasi kerja, dan peningkatan tanggung jawab menjadi pendorong munculnya instruktur bersertifikat positif. Sedangkan masalah beban, pendampingan guru yang kurang, dan sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor penghambat bagi guru bersertifikat yang belum mampu menjalankan kinerjanya secara memadai.
4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ni Putu Krisna Priandari, Dr. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd., Ni Ketut Sari Adyani, S.Pd., M.Hum dengan judul “*Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru (Studi Pada Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di SMK Negeri 1 Singaraja*).”. Memanfaatkan pendekatan kualitatif, investigasi ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa program sertifikasi guru telah berhasil dilaksanakan di SMK Negeri 1 Singaraja, sertifikasi berdampak positif terhadap profesionalisme guru PKn yang terlihat dari peningkatan kinerja guru. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang kurang memadai seperti LCD, permasalahan administrasi penilaian siswa sebagai implikasi implementasi kurikulum 2013, dan analisis perbaikan kendala yang terjadi menjadi tantangan yang dihadapi oleh guru PPKn di SMK Negeri 1 Singaraja. Penyediaan tenaga TI profesional untuk memberikan pelatihan guna membantu guru yang masih kesulitan mengerjakan administrasi penilaian siswa karena kendala pengoperasian TIK, perlu mengatur intensitas MG PKn, dan strategi lainnya dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai dan relevan dengan pembelajaran terkini secara berjenjang.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Shopi Guspiati pada tahun 2020 yang berjudul “*Pengaruh Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik, Serta Dampaknya Terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya”*. Metodologi deskriptif kuantitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah yang bersertifikasi di Kecamatan Bungursari mengalami peningkatan kemampuan mengajar, hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru, meskipun berdampak kecil pada aspek kompetensi profesional, berdampak positif pada peningkatan kompetensi pedagogik. Tata cara kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para guru di Kecamatan Bungursari mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang baik tetapi terbatas karena lebih sedikit guru yang menggunakan TIK untuk memperbaiki diri karena berbagai alasan, termasuk kemungkinan madrasah mereka kekurangan fasilitas, atau ketidak fahaman guru tersebut pada TIK dan Hasil akhir menunjukkan bahwa guru MI yang berada pada lingkungan Kecamatan Bungursari terkait gagasan kebijakan sertifikasi melalui sub aspek yang berpengaruh besar terhadap kompetensi Pedagogik.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Farasandya Amalia Hapsari pada tahun 2018 dengan judul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama).* Menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan penelitian kualitatif dalam karya ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Setia Kota Probolinggo belum dilakukan secara efisien. Karena kurangnya berkas atau folio yang berkaitan dengan sertifikasi, masih ada guru yang belum sepenuhnya memahami proses dan mekanisme sertifikasi guru. Kebijakan sertifikasi guru masih belum dilaksanakan secara maksimal.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Elmi Rahmayanti pada tahun 2015, dengan judul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Ilir”.* Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Menurut kesimpulan studi tersebut, sertifikasi guru belum dilaksanakan secara efektif, dan kinerja belum banyak berkembang. Persoalan ini muncul karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang penerapan sertifikasi guru setelah diterimanya surat keterangan pendidik profesi. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pertumbuhan pendidikan dan kurangnya komitmen dan keahlian guru di Kabupaten Keritang.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Sri Pertiwi pada tahun 2017 yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi terhadap profesionalisme Guru dikecamatan Rengat”* Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Rengat sudah berjalan sesuai protokol yang telah ditetapkan. Temuan analisis data menunjukkan bahwa inisiatif untuk meningkatkan profesionalisme guru sangat bergantung pada sertifikasi guru. Ini berarti bahwa pendidik tidak boleh hanya memberikan materi secara acak kepada siswanya. Seorang guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional. Profesionalisme guru sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Ini akan meningkat lebih tinggi ketika profesionalisme seorang guru meningkat. Selain profesionalisme yang dituntut, maka sekarang sudah mulai harus meningkatkan kompetensinya. Kompetensi guru meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan Sujiantopada tahun 2022, dengan judul “*Implementasi Sertifikasi Guru dalam rangka meningkatkan Profesionalitas Guru”*. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan kajian mengenai dampak sertifikasi guru terhadap peserta didik, instruktur, dan sekolah adalah sebagai berikut: (a) Dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan guru, profesionalisme yang lebih baik, dan semangat mengajar guru yang lebih tinggi. (a) Efek negatif, seperti pengurangan jam mengajar dan kekesalan antar tetangga di antara guru yang tidak bersertifikat. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru, khususnya: (a) Kendala, seperti: Infrastruktur sekolah yang terbatas, keterlibatan siswa yang kurang, dan jam mengajar guru bersertifikat yang tidak mencukupi. b) Usaha-usaha yaitu: Adanya komunikasi pihak guru dan kepala sekolah mengenai mata pelajaran yang diajarkan, Menambah ruang kelas, dan melengkapi sarana prasarana sekolah.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Adlim pada tahun 2017, yang berjudul “*Implementasi kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Kasus pada SMA Negeri 1 Kalisusu)”.* Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sertifikasi guru belum dapat dikatakan efektif menurut temuan. Hal ini terlihat dari proses rekrutmen calon sertifikasi yang lebih mengutamakan ketentuan yang dituangkan dalam kuota sertifikasi guru daripada kualitas peserta. Oleh karena itu, dapat dilihat dari prioritas tersebut bahwa kinerja tidak berubah secara signifikan. Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Kabupaten Buton Utara, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tidak dilakukan dengan standar tertinggi. Tindakan yang telah dilakukan seperti penjangkauan, pemilihan peserta, penyusunan portofolio.
11. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Gede Sujana pada tahun 2020 dengan judul “*Implementasi program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru (Studi pada guru PPKN SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung.* Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pelaksanaan program sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung didasarkan pada temuan studi. Pelaksanaan program sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik, sesuai dengan temuan penelitian yang didasarkan pada metodologi deskriptif kualitatif. Sertifikasi telah mempengaruhi profesionalisme guru PKn yang tercermin dari peningkatan kinerja guru Dan terkait tantangan instruktur PPKn di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kab. Kendala yang dihadapi Badung, antara lain belum tersedianya sarana pembelajaran yang memadai, seperti LCD, dan permasalahan administrasi evaluasi siswa akibat penerapan kurikulum 2013. Adapun analisis solusi atas tantangan yang muncul, sekolah dapat berupaya memenuhi tuntutan sarana pendidikan yang memadai dan mutakhir dengan pembelajaran secara bertahap melalui perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana yang tersedia, baik dari swadaya maupun pemerintah. subsidi, kemudian penyediaan tenaga TI profesional untuk memberikan pelatihan guna membantu guru yang masih kesulitan mengelola penilaian siswa karena tantangan teknologi.
12. Penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Wanda Elly Susanto pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru SD Melalui Program PPG dalam meningkatkan Profesionalitas guru di kabupaten Malang”* Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Kesimpulan kajian menunjukkan bahwa, sesuai dengan temuan analisis yang dilakukan, sertifikasi guru dilaksanakan dengan menggunakan tiga program: program portofolio, PLPG, dan penerbitan sertifikat secara langsung. Setelah kebijakan ini berjalan kurang lebih enam tahun, digantikan dengan program PPG karena guru yang telah menyelesaikan program sertifikasi guru ini dianggap tidak cakap dalam pelaksanaannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengikuti langkah Kementerian Pusat dalam merealisasikan kebijakan tersebut, selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga menyelenggarakan seminar bagi para guru yang akan mengikuti program PPG. Hal ini dinilai baik dalam hal pemantauan dan analisis kebijakan sertifikasi guru. Meski demikian, kebijakan ini masih menemui kendala antara lain beban kurikulum peserta PPG yang berat dari LPTK, kurangnya transparansi waktu, dan kesamaan materi yang disampaikan LPTK dengan peserta PPG.

Dari beberapa penelitian di atas peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) yang berjudul “*Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru di Kota Yogyakarta”* Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu Topik penelitian sama terkait Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap profesionalitas guru, Metode penelitian sama yaitu menggunakan metode kualitatif juga dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan observasi sedangkan perbedannya adalah Objek penelitian yaitu seluruh sekolah SD Negeri yang ada di Kota Yogyakarta, pengumpulan data juga diambil dari data Dinas pendidikan kota Yogyakarta dan LPTK pelaksana sementara dalam penelitian saya pengumpulan data hanya diambil berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, murid dan kemudian Guru sertifikasi. Namun pada penelitian ini yaitu guru sertifikasi yang didapat dengan jalur Portofolio, sementara dalam penelitian saya guru sertifikasi yang akan di teliti yaitu guru yang mendapatkan sertifikasi melalui PPG daljab, PLPG, dan melalui portofolio atau kurang lebih 2 tahun terakhir mendapatkan sertifikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Asrul, dkk (2022) yang berjudul *“Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap profesionalisme guru di kabupaten Buton Utara”* memiliki persamaan yaitu topik penelitian sama terkait Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap profesionalisme guru, Metode penelitian menggunakan kualitatif dan Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Namun untuk perbedaannya yaitu penelitian dilaksanakan di 3 jenjang pendidikan yaitu di satuan pendidikan SD, SMP dan SMA dan subjek penelitian yaitu guru bersertifikasi, kepala sekolah, peserta didik, pihak eksternal yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bintoro, dkk (2019), yang berjudul “*Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kalimantan Timur (studi kasus di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur).* Memiliki persamaan yaitu topik penelitian sama terkait penerapan kebijakan sertifikasi terhadap profesionalisme guru kemudian penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian dilakukan secara luas yaitu diambil di 4 Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Timur, Sasaran pengumpulan data terkait penelitian yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru, Fokus Penelitian adalah melakukan pemetaan terhadap profesionalisme guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMK dan SMK serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan profesionalisme guru. juga teknik pengumpulan data menggunakan FGD, dan studi literatur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Priandari, dkk (2019), yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru (Studi Pada Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Singaraja)”* memiliki persamaan yaitu topik penelitian sama terkait implementasi kebijakan program sertifikasi terhadap profesionalisme guru dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana implementasi program sertifikasi guru pada guru PKn di SMK Negeri 1 Singaraja; Terkait pemantauan dan analisis kebijakan sertifikasi guru, hal ini dinilai menguntungkan. Beban kerja LPTK yang sangat besar pada kurikulum peserta PPG, kurangnya transparansi waktu, dan kedekatan materi yang disampaikan oleh LPTK dan peserta PPG menjadi tantangan yang masih harus diatasi oleh kebijakan ini.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Guspiati (2020), yang berjudul ”*Pengaruh Implementasi Kebijakan* *Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik, Serta Dampaknya Terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya”* memiliki persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini juga membahas pengaruh implementasi kebijakan sertifikasi guru, sementara adapun perbedaan penelitian ini yaitu Sampel penelitian merupakan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya, Fokus penelitian melihat dari segi pengaruh terhadap Kompetensi Pedagogik, Serta Dampaknya Terhadap Kompetensi Profesional Guru, dan untuk penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2019), yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama”* memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Topik penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan sertifikasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pad tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripskikan dan menganalisis hasil pelaksanaan sertifikasi guru sekolah menengah pertama yang ada di kota Probolinggo tahun 2016/ 2017 kemudian metode pengumpulan data tidak hanya wawancara dan observasi, juga menggunakan FGC dan dokumentasi.

Penelitian relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2015), yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Dikecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Ilir Tahun 2012”* memiliki persamaan yaitu meneliti terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Kemudian adapun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya terfokus terhadap sejauh mana implementasi kebijakan sertifikasi tersebut terhadap peningkatan kemampuan guru, khususnya guru SD.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017), yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Sertifikasi terhadap profesionalisme Guru di kecamatan Rengat”* memiliki persamaan yaitu meneliti terkait Implementasi Kebijakan sertifikasi terhadap profesionalisme guru dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan adapun tujuan penelitian ini juga mendeskripsikan peranan sertifikasi guru dalam menunjang profesionalisme guru. Selanjutnya adapun perbedaan penelitian ini yaitu Yang menjadi sasaran informasi dalam penelitian adalah Kepala dinas pendidkan, pengawas, wali murid, dan guru kemudian pada pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, dkk (2022), yang berjudul “*Implementasi Sertifikasi Guru dalam rangka meningkatkan Profesionalitas Guru.”* memiliki persamaan Secara khusus penelitian ini bersifat kualitatif, metodenya deskriptif, teknik analisis datanya adalah pendekatan studi kasus, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh proses implementasi kebijakan sertifikasi guru. Perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengkaji lebih jauh implementasi kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Seberapa besar pengaruh kebijakan sertifikasi terhadap profesionalisme guru? Fokus kajian pada sekolah menengah pertama (SMP) di kota Dumai inilah yang membedakannya dengan kajian lain yang melihat sertifikasi guru.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adlim (2017), yang berjudul *“Implementasi kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Kasus pada SMA Negeri 1 Kalisusu)”* memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Implementasi Kebijakan sertifikasi, dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Adapun perbedaannya adalah tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru , mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Sujana (2020), dengan judul “*Implementasi program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru (Studi pada guru PPKn di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung)* memiliki persamaan yaitu menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pelaksanaan program sertifikasi guru, serta wawancara dan observasi guru untuk mengumpulkan data. Bedanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program sertifikasi guru bagi guru PKn di SMPN 2 Kuta Utara Kab. Badung secara khusus untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru PPKn dalam meningkatkan profesionalisme guru dengan pelaksanaan program sertifikasi guru, menganalisis solusi atas permasalahan yang dihadapi guru PPKn sehubungan dengan profesionalisme guru di SMPN 2 Kuta Badung Utara.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2021), yang berjudul *“Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru SD Melalui Program PPG dalam meningkatkan Profesionalitas guru di kabupaten Malang”* memiliki persamaan yaitu menggunakan metode Deskriptive kualitatif dan penelitian ini juga memfokuskan bagaimana kebijakan sertifikasi guru ini berpengaruh terhadap profesionalitas. Adapun perbedaannya adalah sampel penelitian ini adalah guru SD negeri dan Swasta.

Dari beberapa penjelasan terkait persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yang sudah dijelaskan di atas, yang menjadi ciri khas dari penelitian ini adalah, pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu melalui partisipan yang terdiri dari Guru sertifikasi yang mendapatkan sertifikasi melalui tahapan apa saja baik itu melalui tahapan pemberian secara langsung, PLPG, portofolio maupun PPG, kemudian yang memberikan kejutan dalam penelitian ini, juga ditampilkan pernyataan dari peserta didik terkait pengalaman belajar peserta didik ketika belajar dengan guru yang sudah bersertifikasi, walaupun informasi atau data yang berasal dari partisipan peserta didik ini adalah jenis data pendukung, namun hal ini menjadi sesuatu yang memperkuat nantinya untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait profesionalitas guru.

# BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode dan Rancangan Penelitan

Metode penelitian yang digunakan metodologi studi kasus dan teknik penelitian kualitatif. Yang dikemukakan oleh Creswell (2010), yang menyatakan bahwa kualitatif adalah strategi yang digunakan oleh banyak orang atau sekelompok orang untuk menyelidiki dan menginterpretasikan makna, yang diduga berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Tujuan penelitian kualitatif secara tradisional adalah untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan juga mendeskripsikan fenomena yang menarik, menurut Marshal & Rossman (1999). *“to explore, explain, or describe the phenomenon of interest.* Selain itu, menurut Marriam (1998), metode kuantitatif mengedepankan proses, makna, dan pengetahuan. Hasil penelitian kualitatif demikian“*richly description*”. Dan studi kasus memiliki pemahan yaitu suatu jenis penelitian kualitatif (Creswell. 1998, 2007, 2011, Jhonson & Cristensen (2008)). Juga menurut Marriam (1998), metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah *“an intensive and holistic description, explanation, and analysis of a bounded system” or phenomenon such as a person, a program, an institution, a process, a social unit, a group, and a policy.* (Creswell, 2007)

Kemudian, pada penelitian ini yang mana menurut Creswell (2011) terdapat lima jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu *case study, ethnography, phenomenolgy, narrative/ biography/ histprical,* dan  *grounded theory,*  Penelitian ini menggunakan metodologi atau desain studi kasus. Hal ini didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Marriam (1998), bahwa salah satu ciri studi kasus adalah adanya batasan subjek yang boleh diteliti, subjek yang dapat diwawancarai, subjek yang dapat diamati, dan tempat penelitian yang dapat digunakan. Mengikuti pernyataan Merriam (1998) bahwa studi kasus atau sistem terbatas dapat berupa anak, program, atau sekolah, pilihan studi kasus juga bergantung pada pernyataan ini. Penerapan kebijakan sertifikasi dalam profesionalisme guru menjadi “kasus” dalam penelitian ini.

### 3.2 Lokasi Penelitian dan Akses

Penelitian ini dilaksanakan disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi yaitu di SMP Negeri 18 Muaro Jambi. Karena akan mempengaruhi bagaimana dan siapa yang akan menawarkan data, akses penelitian merupakan indikator penting dalam penelitian kualitatif penelitian ini. Peneliti menggunakan berbagai jaringan dan ikatan bawaan untuk mendapatkan akses ke lokasi penelitian. Peneliti juga bekerja di sekolah tersebut sebagai guru.

### 3.3 Prosedur Sampling dan Peserta Penelitian

Adapun hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dikenal istilah populasi. Sebaliknya penelitian kualitatif lebih menekankan pada apa yang disebut *“Purposive Sampling”.* Sebagaimana Creswell (2007) ide *purposive sampling* diterapkan dalam penelitian kualitatif ketika peneliti memilih partisipan dan lokasi penelitian karena mereka dapat memberikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa pihak dari sekolah dimasukkan dalam sampel dan peserta penelitian untuk penelitian ini. Peserta penelitian terdiri dari siswa dengan latar belakang nilai di atas dan di bawah KKM, tim supervisi sekolah, guru berkualitas yang bersedia mewakili 10 disiplin ilmu, dan wakil kepala sekolah. Yang mana dalam penelitian ini diutamakan kenyamanan para partisipan. Dan sebelum peneliti melakukan pengumpulan data terhadap partisipan, peneliti akan mengajukan *consent form* yang mana dari *consent form* tersebutlah peneliti akan mengetahui kesediaan partisipan.

### 3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2011), Empat metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dokumen, dan sumber audio visual. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur observasi dan wawancara dengan pemahaman bahwa hal tersebut akan memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini adalah sumbernya yaitu partisipan yang memang benar benar mengalami dan merasakan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan partisipan juga akan menjelaskan secara langsung terkait pertanyaan yang diajukan oelh peneliti. Sedangkan yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik obeservasi yaitu menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2011) menjelaskan Ada beberapa alasan mengapa observasi sangat penting untuk penelitian kualitatif, antara lain: 1) observasi didasarkan pada pengalaman langsung; 2) observasi memungkinkan peneliti merekam peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan secara proporsional serta pengetahuan langsung yang diperoleh dari data; 3) observasi memungkinkan peneliti melakukan pemeriksaan silang data; dan 4) observasi sebagai metode pengumpulan data. Hal ini diyakini oleh peneliti untuk menggunakan teknik wawancara dan observasi.

#### 3.4.1 Observasi

Creswell (2016) menunjukkan bahwa observasi adalah strategi pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti melakukan perjalanan langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati perilaku dan aktivitas masyarakat.

Sutrisno Hadi (2002) mendefinisikan metode observasi sebagai pengamatan sistematis dan pendokumentasian terhadap kejadian yang sedang diselidiki. Selain itu, Gulo (2002) mengklaim bahwa pengamatan (observasi) adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti atau rekannya menangkap data saat mereka mengamatinya saat melakukan penelitian. Sesuai dengan definisi yang diberikan di atas, metode observasi dapat merujuk pada suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara seksama situasi atau kejadian di lapangan.

Adapun jenis-jenis obeservasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi non partisipan, artinya peneliti tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi
2. Observasi yang berstruktur, artinya dalam melakukan observasi peneliti mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

## 3.4.2 Wawancara

Menurut Creswell (2018), dalam mewawancara peneliti bisa melakukan wawancara berhadap-hadapan (*face to face)* dengan participan, mewawancari mereka dengan telepon, atau terlibat wawancara dalam suatu kelompok (*focus group interview)*. Dan pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti dilakukan secara face to face yang mana wawancara dilakukan berdasarkan interview protokol yang sudah peneliti siapkan, tiap katagori partisipan memiliki pertanyaan yang berbeda beda namun pertanyaan difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Menurut pendapat Merriam (1998), adapaun wawancara dimaksud yaitu metode pengumpulan data yang paling sering dipakai para peneliti ketika ingin meneliti sesuatu yang sudah terjadi dimasa lalu karena tidak mungkin diulang kembali lagi (*Interviewig is preferred data collection method when researchers want to examine past events, which are not possible to repeat)*. Dan dengan dipandu oleh “*Interview protocol”*, dalam penelitian ini para peserta diwawancarai secara *face to face* mengenai implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru.

### 3.5 Kredibilitas Data dan Etika Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas disebut dengan trustworthiness karena sudah dikenal dalam penelitian kuantitatif. Menurut Lincoln dan Guba (1985), mengembangkan keyakinan dalam penelitian sangatlah penting, (*The most critical technique for establishing credibility”).*  Dan menurut Creswell (2011), Dalam penelitian kualitatif, keandalan data sangat penting untuk menghindari bias yang disebabkan oleh masuknya penilaian subyektif peneliti. Peneliti awal dalam penelitian ini mewawancarai berbagai partisipan penelitian selama 30 sampai 40 menit untuk memastikan validitas data. Gunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara untuk kemudian melakukan triangulasi hasil. Langkah ketiga adalah member checking, yaitu data hasil wawancara yang telah ditranskrip dikembalikan kepada partisipan penelitian untuk menentukan apakah akurat dan konsisten dengan apa yang mereka katakan selama wawancara. Terakhir, para peserta dan pembimbing tesis peneliti diminta pendapatnya tentang semua data yang telah terkumpul.

Mengenai etika penelitian, semua identitas dan lokasi dalam penelitian ini yang menyertakan manusia sebagai subjek penelitian ditutup-tutupi. Dengan kata lain, semua nama dan lokasi penelitian diubah dari bentuk aslinya untuk menjaga kerahasiaan data partisipan. Kemudian, semua calon relawan penelitian akan diminta untuk menyerahkan surat konfirmasi ketersediaan mereka.

### 3.6 Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini meliputi analisis kualitatif induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pengembangan pola hubungan tertentu. Reduksi data, penyajian data, dan visualisasi data merupakan proses yang diperlukan dalam analisis data dan *conclusion drawing* atau *verification* (Nasution,1999)

Miles and Huberman (2005), menyarankan bahwa untuk memastikan kelengkapan data, kegiatan yang terlibat dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *reduction data, display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification.*

#### 3.6.1 Manajemen Data

Data data yang sudah terkumpul baik hasil observasi dan juga wawancara di masukan ke dalam database komputer, berbentuk file untuk dianalisa. Adapun guna database ini yaitu sebagai alat yang memudahkan peneliti dalam menganalisa berbagai data yang sudah dikumpulkan sehingga ketika diperlukan data yang ada didalam database muda diakses dalam proses analisa..

#### 3.6.2 Pengkodean dan Pembuatan Tema

Johnson & Christensen (2008) mengatakan bahwa, *“Coding is a process of marking segments of data (usually text data) with symbols, descriptive word, or catagories”.* Coding adalah teknik analisis yang melibatkan pelabelan elemen data tertentu dengan simbol, kata sifat, dan klasifikasi. Transkripsi individu akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data wawancara. Setelah ditranskrip, data wawancara akan diberi kode.

Semua data hasil wawancara akan dibaca secara seksama dan berulang-ulang untuk penelitian ini guna (1) menemukan dan merekam setiap pernyataan yang signifikan dari setiap partisipan penelitian terkait dengan masalah penelitian, (2) membuat pengelompokan data yang signifikan dari setiap partisipan penelitian, (3) membuang dan mereduksi data yang sama dan muncul berulang kali, dan (4) membuat dan mengkategorikan tema berdasarkan pertanyaan penelitian. Begitu juga dengan hasil observasi yang akan digunakan ebagai sarana untuk cross check hasil wawancara dan memperkuat hasil wawancara.

### 3.7 Penyajian Hasil

Menurut Marriam (1998), metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengutamakan proses, makna, dan pemahaman karena itu produk dari penelitian kualitatif adalah ”*richly description”*. Dengan kata lain, output atau hasil analisis data dalam penelitian ini dihasilkan oleh prosedur pengkodean dan akan disajikan sebagai pernyataan dan deskripsi dari subjek penelitian. Selain menyajikan contoh-contoh pernyataan partisipan penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalisme guru, studi ini juga melaporkan temuannya.

## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Profil Sekolah

Sekolah ini secara resmi beroperasi pada tahun 1999. Dengan jumlah guru sebanyak 18 orang, tenaga kependidikan 4 orang dan jumlah siswa sebanyak 197 orang yang terdiri dari 103 laki-laki dan 94 perempuan dengan rombongan belajar sebanyak 8 kelas.

Secara geografis sekolah ini berlokasi di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Sekolah ini berada di kawasan pedesaan dan juga banyak pabrik di sekitarannya.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Sekolah

**Visi**

**“**Disiplin, Berprestasi, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan Atas dasar Iman dan Taqwa”

**Misi**

1. Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertaqwa
2. Mewujudkan warga sekolah yang disiplin disegala aspek
3. Mewujudkan kemampuan Akademik dan Non Akademik yang kompetitif
4. Mewujudkan fasilitas sekolah yang memadai
5. Mewujudkan warga sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan sekolah yang asri, bersih dan rindang
7. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, nyaman dan menyenangkan.

#### Data Tenaga Pendidik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Mata Pelajaran | Jumlah Guru Sertifikasi | Jumlah Guru Non Sertifikasi | Jumlah Keseluruhan |
| 1 | Bahasa Indonesia | 1 |  | 1 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Matematika | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 |  | 2 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 1 |  | 1 |
| 6 | Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) | 1 |  | 1 |
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Seni Budaya | 1 |  | 1 |
| 8 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Prakarya | 1 |  | 1 |
| 10 | Bimbingan Konseling (BK) | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH | | 13 | 5 | 18 |

### 4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif studi kasus ini, penelitian ini mengenai Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru yang dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.

Partisipan penelitian ini yaitu wakil kepala sekolah, 2 orang tim supervisi, perwakilan guru tiap mapel yang bersertifikasi sejumlah 10 orang dan 4 orang peserta didik yang diambil dari 2 tingkatan kelas yaitu kelas 8-9 yang mana untuk peserta didik sendiri dipilih berdasarkan daftar nilai yang memenuhi kriteria diatas KKM dan dibawah KKM. Sementara untuk Karakteristik partisipan lainnya diambil berdasarkan kriteria yang memenuhi dalam tujuan penelitian yaitu guru yang bersertifikasi, dan stakeholder sekolah (wakil kepala sekolah dan 2 orang tim supervisi). Untuk guru yang bersertifikasi pun adalah guru yang sudah bertugas lebih dari 2tahun masa kerja. Adapun data partisipan penelitian dapat dilihat pada tabe; berikut :

Tabel 4.3 Partisipan Penelitian

|  |  |
| --- | --- |
| **Partisipan** | **Keterangan Jabatan** |
| Partisipan 1 | Wakil Kepala Sekolah |
| Partisipan 2 | Tim Supervisi 1 |
| Partisipan 3 | Tim Supervisi 2 |
| Partisipan 4 | Guru Bahasa Inggris |
| Partisipan 5 | Guru Bahasa Indonesia |
| Partisipan 6 | Guru Matematika |
| Partisipan 7 | Guru Ilmu Pendidikan Alam |
| Partisipan 8 | Guru Ilmu Pendiidkan Sosial |
| Partisipan 9 | Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan |
| Partisipan 10 | Guru Prakarya |
| Partisipan 11 | Guru Seni Budaya |
| Partisipan 12 | Guru Pendidikan Agama Islam |
| Partisipan 13 | Guru Bimbingan Konseling |
| Partisipan 14 | Siswa Kelas 8 di atas KKM |
| Partisipan 15 | Siswa Kelas 8 di bawah KKM |
| Partisipan 16 | Siswa Kelas 9 di atas KKM |
| Partisipan 17 | Siswa Kelas 9 di bawah KKM |

Adapun uraian dari partisipan didalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu Partisipan 1 yaitu Beliau merupakan Wakil kepala sekolah di satuan pendidikan tempat peneliti melakukan penelitian, Beliau sudah bekerja sejak 1999 dari pertama sekolah tersebut berdiri dan beroperasi, namun sebelum bertugas menjadi wakil kepala sekolah, beliau melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Dan pada saat diwawancarai Partisipan 1 sudah bertugas menjadi wakil kepala sekolah selama lebih kurang 1 tahun lebih, dan juga merupakan guru bersertifikasi sejak 2011.

Informan atau Partisipan ke-2 dalam penelitian studi kasus ini adalah merupakan guru Wakil kepala sekolah yang juga melaksanakan tugas sebagai Tim supervisi sekolah, dimana partisipan 2 melaksanakan tugasnya dalam mensupervisi guru disekolah sebanyak 2kali dalam 1 tahun periode pembelajaran.

Partisipan 3 merupakan Tim supervisi ke 2 yang berada di lokasi satuan pendidikan tempat peneliti melakukan penelitian.. Tim supervisi ke 2 ini sudah bekerja lebih kurang 14 tahun masa kerja dan juga melaksanakan tugas pokok sebagai Guru Bahasa Inggris yang sudah bersertifikasi.

Partisipan 4 adalah Guru bahasa Inggris bersertifikasi yang lulus melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi guru sejak 2008, Beliau juga memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan yang mana untuk tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan diakui sebanyak 12 Jam pelajaran yang didukung dengan adanya sertifikat pelatihan kepala perpustakan yang sudah beliau ikuti dan selesaikan.

Partisipan 5 adalah Guru Bahasa Indonesia yang sudah bekerja sejak 2001, beliau merupakan guru bersertifikasi dengan lulusan mengikuti tahapan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Untuk partisipan 5 merupakan guru yang bernaung dari Kementrian Agama, karena beliau merupakan lulusan S1 pendidikan Agama Islam.

Partisipan 6 adalah Guru Matematika yang sudah bekerja sejak 2011, beliau merupakan guru bersertifikasi dengan lulusan tahapan Pendidikan Profesi Guru yang lulus sejak 2020.

Sedangkan untuk partisipan 7 adalah Guru Ilmu Pengetahuan Alam yang sudah bertugas sejak 2008, dan sudah bersertifikasi melalui tahapan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sejak 2014, partisipan ini juga memiliki tambahan tugas sebagai Kepala Labor IPA yang diakui sebanyak 12 jam pelajaran yang didukung dengan adanya sertifikat bahwa telah mengikuti pelatihan Kepala Labor yang sudah beliau ikuti dan selesaikan.

Partisipan 8 merupakan Guru Ilmu Pengetahuan yang sudah bekerja di instansi tersebut selama lebih kurang 14tahun, dan beliau juga sudah dinyatakan sebagai guru penerima sertifikasi.

Sementara untuk partisipan 9 adalah guru yang mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, yang mengikuti seleksi sertifikasi pertama melalui tahap seleksi portofolio namun tidak lolos, selanjutnya mengikuti tahapan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Partisipan 10 adalah Guru Prakarya, yang sudah bertugas sejak tahun 2006 dan merupakan guru bersertifikasi dibawah naungan Kementrian Agama. Beliau mengikuti tahapan seleksi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Partisipan 11 adalah Guru Seni Budaya, yang sudah bekerja lebih kurang 14tahun di lokasi penelitian, partisipan 11 juga merupakan guru bersertifikasi dibawah naungan Kementrian Agama, yang mengikuti Pendidikan dan latihan Profesi Guru.

Partisipan 12 adalah Guru Pendidikan Agama Islam yang juga merangkap menjadi Wakil Kepala sekolah dibidang Kurikulum, beliau sudah bersertifikasi dengan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sejak 2014.

Kemudian untuk Partisipan 13 adalah Guru Bimbingan Konseling yang sudah bekerja di instansi tersebut lebih dari 20tahun, dan sudah bersertifikasi.

Selanjutnya partisipan 14 merupakan siswa kelas 8 yang sudah di pilih berdasarkan daftar nilai yang diberikan walikelas karena memiliki nilai diatas KKM pada semester Ganjil ini.

Partisipan 15 adalah siswa kelas 8 yang dipilih berdasarkan nilai yang sudah diberikan walikelasnya karena memiliki nilai dibawah KKM pada semester Ganjil ini.

Untuk partisipan 16 merupakan siswa kelas 9 yang dipilih berdasarkan nilai yang sudah diberikan walikelas karena memiliki nilai diatas KKM pada semester Ganjil ini.

Dan yang terakhir adalah partisipan 17 yang merupakan siswa kelas 9 yang dipilih berdasarkan nilai semester ganjil karena memiliki nilai dibawah KKM.

### 4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Apa peran sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupate Muaro Jambi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas maka perlu dijabarkan terlebih dahulu beberapa penjelasan terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi itu sendiri. Selanjutnya mengenai kebijakan sertifikasi guru ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas guru di seluruh Indonesia. Pada UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mana disahkan pada Desember 2005. Yang dimaksud dengan sertifikasi guru yaitu proses pemberian sertifikat guru kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kualifikasi yang berdasarkan pada UU No.14 Tahun 2005 berkaitan dengan guru dan dosen. Juga pada keputusan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan keputusan Menteri Pendidikan No. 16 tahun 2007 berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kualifikasi guru dan keputusan Menteri pendidikan no. 18 tahun 2007 tentang sekolah kejuruan-kualifikasi guru, (Djaali. 2011)

Kemudian dalam Undang-undang guru dan dosen No. 14 tahun 2005 terkait kompetensi guru yang tertuang dalam Bab IV pasal 8, bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi, kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan juga memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan juga terkait kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian , sosial dan profesional yang di dapatkan melalui pendidikan profesi.

Dari hasil data wawancara yang dilakukan penelitian terhadap Tujuh Belas partisipan atau informan menunjukan bahwa terdapat berbagai informasi atau data baru terhadap Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru di lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Analisa data dilakukan biak secara individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan terlampir) menunjukan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama terdapat Empat (tema) atau kategori yang berkaitan Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru sebagai temuan utama dalam penelitian studi kasus kualitatif di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil Penelitian ini dibagai menjadi Empat (4) tema utama dengan tujuh (7) sub-temanya, yakni (1) Guru yang memiliki Kompetensi Pedagogik degan empat sub-tema, (2) Guru yang memiliki Kompetensi Kepribadian dengan dua sub-tema, (3) Guru memiliki Kompetensi Profesional dengan satu sub-tema, dan (4) Guru memiliki Kompetensi Sosial dengan tiga sub-tema sebagaimana tergambar dalam gambar 4.1, 4.2. 4.3 dan 4.4 dibawah ini.

**Gambar 4.1** Di bawah ini menunjukan hasil temuan berkaitan dengan tema dan subtema: Kompetensi Pedagogik yang dimiliki guru berkaitan dengan profesionalitas guru setelah mengimplementasikan kebijakan sertifikasi.

**Gambar 4.1** Tema dan Sub-tema : Kompetensi Pedagogik yang dimiliki guru bersertifikasi

### Gambar 4.1 menunjukan terdapat empat sub-tema berkaitan dengan profesionalitas guru yang dibuktikan dengan memiliki Kompetensi Pedagogik tiap guru yang telah bersertifikasi. Sub- tema pertama adalah kemampuan guru dalam memahami peserta didik. Sub- tema kedua adalah kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Sub tema ketiga adalah guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran dan Sub-tema ke empat yaitu guru mampu merancang dan melaksanakan evaluasi.

Selanjutnya adalah gambar ke 2 yaitu menunjukan tema ke 2 berkaitan dengan implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru yang ditunjukan dengan memiliki Kompetensi Kepribadian dengan jumlah sub tema sebanyak dua sub-tema

**Gambar 4.2** Tema dan Sub Tema : Kompetensi Kepribadian yang dimiliki Guru yang bersertifikasi

Gambar 4.2 diatas menunjukan terdapat dua sub-tema berkaitan dengan Kompetensi Kepribadian yang dimiliki guru yang bersertifikasi. Sub-tema pertama adalah guru memiliki kepribadian yang berwibawa. Kemudian Sub-tema kedua adalah guru memiliki kepribadian yang dewasa.

### Gambar 4.3 dibawah ini menunjukkan hasil temuan terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru yang mana ditunjukan dengan memiliki Kompetensi Profesional.

### Gambar 4.3 Tema dan sub tema ke 2 Kompetensi Profesional yang dimiliki guru berkaitan dengan profesionalitas guru setelah mengimplementasikan kebijakan sertifikasi

Dari gambar 4.3 diatas, terlihat bahwa hasil penelitian ini menemukan satu sub-tema berkaitan Kompetensi Profesional yang dimiliki guru yang telah bersertifikasi. Adapun sub-temanya adalah Guru menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.

Gambar 4.4 di bawah ini menunjukkan hasil temuan terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru yang mana ditunjukan dengan memiliki Kompetensi Sosial

**Gambar 4.4** Tema dan Sub Tema: Kompetensi Sosial yang dimiliki guru yang telah bersertifikasi.

Dari gambar 4.4 diatas, terlihat bahwa hasil penelitian ini menemukan dua sub tema berkaitan dengan Kompetensi Sosial yang dimiliki guru yang bersertifikasi yang menunjukkan keprofesionalitasannya.

### Kompetensi Pedagogik- sebagai implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru

Hasil penelitian ini dalam kaitannya dengan temuan pada tema Kompetensi Pedagogik yang dimiliki guru terhadap implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitasnya terdapat empat sub-tema. Pertama, guru yang telah dinyatakan profesional sudah memiliki kemampuan dalam memahami peserta didik, yang mana guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Kedua, guru dalam menunjukan profesionalitasnya mampu merancang pembealajaran yang mana dibuktikan dengan pembuatan RPP yang sudah sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku. Ketiga, guru juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki guru. Keempat, guru menunjukan profesionalitasnya dengan memiliki kemampuan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran. Keempat sub-tema ini akan dijelaskan secara detail dibawah ini yang akan didukung oleh hasil wawancara berdasarkan hasil analisa data baik individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan-terlampir).

* + - 1. **Guru memiliki kemampuan Kompetensi Pedagogik dengan ditunjukan melalui kemampuan guru dalam memahami siswa**.

Dari hasil observasi didalam kelas yang dilakukan oleh peneliti telah nampak bahwa guru sudah mampu memahami peserta didik didalam kelas terlihat bagaimana guru memperlakukan siswa berkebutuhan khusus berbeda dengan siswa lainnya juga berdasarkan hasil wawancara tiap guru menunjukan bahwa guru yang bersertifikasi sudah mampu memahami karakteristik siswa. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara tim supervisi di sekolah yang melakukan penilaian uji kinerja disetiap semesternya yang menunjukan bahwa guru guru sudah mampu menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, hal tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan karakteristik siswa didalam kelas.

Berdasarkan hasil wawancara ke tigabelas guru yang bersertifikasi menunjukan semua guru bersertifikasi mampu dalam memahami siswa didalam kelas. Salah satu partisipan yang peneliti wawancara yakni Partisipan 2 yang mana merupakan tim supervisi sekolah mengungkapkan bahwa semua guru yang bersertifikasi sudah memiliki kemampuan dalam memahami siswa didalam kelas hal ini ditunjukan dengan pembuktian guru guru didalam kelas dalam memperlakukan peserta didik berdasarkan karakteristik dan kemampuan peserta didik dikelas, sebagaimana Partisipan 2 ungkapkan dibawah ini,

“ ya sudah.... guru guru yang bersertifikasi ini sudah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam memahami peserta didik, hal ini bisa dibuktikan bagaimana guru memperlakukan siswa dikelas berdasarkan kemampuan peserta didik, dan disekolah inijuga guru guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.” (Partisipan 2- Tema-1).

Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 menunjukan bahwa guru yang bersertifikasi telah menunjukan profesionalitasnya dalam memahami peserta didik didalam kelas.

Kemudian hal senada juga sama disampaikan oleh pasrtisipan 4 yang mana merupakan guru bidang studi Bahasa Inggris yang sudah bersertifikasi terkait dengan kemampuan yang beliau miliki dalam memahami peserta didik, Partisipan 4 mengungkapkan bahwa,

“Kalau saya didalam kelas, jelas sudah mampu memahami siswa, karena hal ini juga mempermudah saya dalam memperlakukan siswa didalam kelas sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa, karena tidak semua siswa bisa diperlakukan sama didalam kelas... yaa...ada yang bisa diperlakukan dengan tegas ada yang bisa diperlakukan dengan cara yang halus.” (Partisipan 4-Tema-1)

Selanjutnya dari perspektif siswa didalam kelas yang peneliti ajak wawancara menyampaikan terkait perlakuan guru dalam menghadapi siswa disampaikan oleh Partisipan 15 dalam wawancaranya diungkapkan bahwa,

“Ibu tu ya... baik jadi kalau saya memang tidak paham sekali dengan pelajaran ibu mau menjelaskan kepada saya pelan pelan apa yang saya tanyakan, yang penting yaa..... saya harus berani jujur kalau saya tidak paham.” (Partisipan 15-Tema-1)

Dari wawancara dengan para guru, tim supervisi dan siswa di instansi terkait sudah menunjukan bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kemampuan dalam memahami siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan karakteristik siswa hal ini sebagaimana digambarkan dalam bagan 1 dibawah in,

**Bagan 1 : Temuan Sub-Tema 1- Guru memiliki kemampuan memahami siswa di dalam kelas**

* + - 1. **Guru memiliki kemampuan Kompetensi Pedagogik dengan ditunjukan melalui kemampuan guru dalam merancang pembelajaran**.

Dari hasil obeservasi yang dilakukan peneliti sebelum masuk kelas, guru sudah mempersiapkan Rencana pembelajaran yang sebelumnya sudah dibuat selama satu semester juga hal ini diperkuat dari hasil wawancara bersama guru bersertifikasi dan Wakil kepala sekolah menunjukan bahwa setiap guru yang dinyatakan profesional sudah harus mampu dalam merancang pembelajaran, karena berkaitan dengan administratif guru ini merupakan hal krusial dalam proses pelaksanaan tugas tiap guru, hal ini juga merupakan tanggung jawab setiap guru dalam mempersiapkan kelengkapan dalam mengajar, tidak hanya itu penyusunan rancangan pembelajaran pun disesuaikan dengan model model pembelajaran yang berlaku, guru guru yang bersertifikasipun mampu merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran yang akan disampaikan, sebagaimana Partisipan 1 ungkapkan dibawah ini,

“Kalau rekan rekan guru ini memang sudah mampu merancang pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan topik yang akan disampaikan didalam kelas, karena terkait rencana pembelajaran ini lah yang menentukan alur bagaimana proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran bisa tercapai...” (Partisipan 1-Tema-1)

Apa yang diungkapkan partisipan 1 ini juga menggambarkan bahwa profesionalitas guru yang bersertifikasi ini sudah dibuktikan dalam kegiatan pembelajaran sehari hari bahwa implementasi kebijakan sertifikasi ini dalam profesionalitas guru sudah dibuktikan dengan mampunya guru dalam merancang pembelajaran, kemudian senada juga disampaikan oleh partisipan 7 sebagaimana dalam wawancaranya dibawah ini,

“ya... kalau saya RPP itu seperti petunjuk arah, karena guru itu harus melangkah kekelas itu arahnya harus jelas, maka tidak bisa main main kalau merancang pembelajaran. Kita harus tau langkah langkah tiap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya mau seperti apa...jadi guru harus mampu dalam merancang pembelajaran...” (Partisipan 7- Tema-1)

Dari wawancara diatas bersama partisipan 7, menunjukan bahwa profesionalitasnya sebagai guru itu ditunjukan dengan bukti bahwa dalam merencanakan pembelajaran sikap guru tidak bisa disepelehkan karena guru harus mampu memahami tiap langkah perencanaan dalam proses pembelajaran didalam kelas. Selanjutnya hal ini juga di perkuat dengan hasil wawancara dengan partisipan 10 , mengungkapkan sebagai berikut,

“Kalau merancang pembelajaran ini sudah merupakan kewajiban yang harus di kerjakan oleh guru, guru harus sudah mampu merancang pembelajaran, karena seperti saya tidak lagi mengcopy paste RPP.. sebab sudah banyak pelatihan untuk merancang pembelajaran inovatif di MGMP tiap mapel jadi sudah bisa saya terapkan ke diri saya untuk merancang rencana pembelajaran.” (Partisipan 10-Tema-1)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa profesionalitas guru juga ditunjukan dengan komitmen guru untuk selalu mengupgrade ilmunya dengan aktif mengikuti MGMP tiap mata pelajaran karena melalui Musyawara Guru Matapelajaran Guru dapat meningkatkan kemampuan dan menambah informasi terkait pelaksanaan tugasnya di sekolah sebagai guru yang profesional. Sebagaimana tergambar didalam Bagan 2 dibawah ini:

**Bagan 2: Temuan Sub Tema 2 Guru memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran**

* + - 1. **Guru memiliki kemampuan Kompetensi Pedagogik dengan ditunjukan melalui kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran**

Dalam hasil observasi peneliti terhadap beberapa partisipan didalam kelas menunjukan guru sudah dapat melaksanakan pembelajaran didalam kelas degan baik terlihat bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif, juga berdasarkan analisa data wawancara muncul sub tema dalam kompetensi Pedagogik yang mana guru mampu dalam melaksanakan pembelajaran, dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud yaitu guru mampu melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Hal ini pun diperkuat dengan hasil wawancara Tim supervisi sekolah, guru yang bersertifikasi diskeolah tersebut dan peserta didik, sebagaimana Partisipan 3 menyampaikan dalam wawancaranya dibawah ini,

“ Kalau dari hasil penilaian supervisi yang saya lakukan, rata rata guru sertifikasi ini sudah bisalah melaksanakan pembelajaran yang kondusif, karena memang itu merupakan tugas pokoknya dan sudah dilaksankannya sehari hari jadi sudah bukan sesuatu yang harus dipertanyakan lagi karena mereka sudah harus bisa menjalankan perannya sebagai guru....” (Partisipan 3-Tema-1)

Pernyataan partisipan 3 ini ditunjukan dengan hasil penilaian kinerja guru ketika tim supervisi melakukan penilaian, bahwa guru sudah menunjukan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran yang kondusif didalam kelas, kemudian hal senada disampaikan pula oleh Partisipan 6 terkait pelaksanaan pembelajaran dikelas, bahwa guru yang bersertifikasi hampir semua sudah memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran dikelas yang kondusif karena hal ini merupakan tugas pokok guru untuk dapat menyampaikan pembelajaran yang baik dan benar, sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh partisipan 6 dibawah ini,

“hmm,,, masalah mengajar itu sudah pasti semua guru bisa melaksanakannya, hanya saja setiap guru memiliki cirikhas dalam menyampaikan pembelajarannya, kalau saya dalam melaksanakan pembelajaran itu yang terpenting bagaimana cara saya membawa pelajaran itu dengan menyenangkan agar bisa tercapai tujuan pembelajaran dikelas saya....” (Partisipan 6-Tema-1)

Dari apa yang disampaikan oleh partisipan 6 sebagai guru yang bersertifikasi hal yang dapat digambarkan dari pernyataan tersebut adalah kemahiran guru dalam mengolah keadaan kelas dan penyampaian pembelajaran adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan hal ini mencerminkan sikap profesionalitas seorang guru yang bersertifikasi, kemudian juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti bersama partisipan 14 yang mana merupakan peserta didik yang memiliki pengalaman diajar oleh guru yang sudah dinyatakan profesional dengan dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat pendidik, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut,

“ Seneng nian lah.... kami diajar sama bapak itu karena didalam kelas pembelajarannya menarik dan menyenangkan juga apa yang disampaikan oleh bapak bisa dimengerti.” (Partisipan 14- Tema-1)

Apa yang disampaikan oleh partisipan 14 merupakan sebuah pengalaman dan bukti bahwa seorang guru yang memiliki profesionalitas yang tinggi, dapat menyampaikan pembelajaran dengan sebaik baiknya ditengah segala keterbatasan kondisi demi tercapainya tujuan pembelajaran. Sebagaimana di gambarkan oleh Bagan 3 dibawah ini :

**Bagan 3: Temuan Sub Tema 3 Guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran.**

* + - 1. **Guru memiliki kemampuan Kompetensi Pedagogik dengan ditunjukan melalui kemampuan guru dalam membuat dan mengevaluasi pembelajaran.**

Didalam Undang Undang Guru dan dosen No.14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru yang profesional yaitu guru yang memiliki 4 Kompetensi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang sudah bersertifikasi adalah Kompetensi pedagogik, yang mana didalamnya terdapat Indikator bahwa guru mampu membuat dan mengevaluasi pembelajaran, dalam hasil obeservasi peneliti didalam kelas, guru telah mampu membuat soal formatif dan juga melaksanakan evaluasi pembelajaran didalam kelas setelah proses pembelajaran berakhir kemudian juga berdasarkan analisa data dari wawancara para partisipan menunjukan bahwa di lokasi penelitian yang peneliti teliti menunjukan bahwa guru telah mampu membuat dan mengevaluasi pembelajaran hal ini disampaikan oleh Partisipan 8, yang mana merupakan guru bersertifikasi, beliau menyatakan bahwa,

“Sebagai guru diakhir pembelajaran biasanya kami melakukan evaluasi pembelajaran, dalam hal ini kami biasa merancang soal evaluasi dan mebuat kisi kisi dari soal evaluasi tersebut hal ini berguna untuk mengetest pemahaman siswa yang kami ajar apa sudah paham atau belum... begitu” (Partisipan 8-Tema1)

Hasil wawancara bersama Partisipan 8 ini menunjukan bahwa yang bersangkutan telah membuat dan melakukan evaluasi didalam proses pembelajarannya di akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa terhadap apa yang telah disampaikannya di akhir pembelajaran, peneliti juga berkesempatan mewawancarai guru bersertifikasi lainnya yang mana selanjutnya Partisipan 12 juga menyampaikan terkait pembuatan dan melakukan evaluasi merupakan sesuatu hal yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan didalam pembelajaranya, dalam wawancaranya partisipan 12 menyampaikan bahwa,

“Kalau saya, membuat soal test untuk siswa itu sudah saya siapkan ketika saya merancang pembelajaran jadi 1 paket RPP itu sudah didalamnya ada kisi kisi dan soal test siswa, soal biasanya saya buat sendiri berdasarkan sumber dari internet atau buku pegangan yang digunakan dalam pembelajaran.” (Partisipan 12-Tema-1)

Dari apa yang disampaikan oleh partisipan 12 menggambarkan kesiapan guru dalam persiapan pembelajaran yang sudah cukup matang dan guru menunjukan profesionalitasnya yang mana didalam persiapan pembelajaran semua instrumen pembelajaran termasuk lembar evaluasi sudah disiapkan didalam perencanaan pembelajaran. Hal ini juga tegambar dalam Bagan 4 dibawah ini.

**Bagan 4: Temuan Sub Tema 4 Guru memiliki kemampuan dalam membuat dan melakukan evaluasi pembelajaran**

### Kompetensi Kepribadian- sebagai implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru

Hasil analisa data pada penelitian ini menemukan kaitanya terhadap tema Kompetensi Kepribadian yang dimiliki guru pada implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitasnya terdapat dua sub-tema. Pertama, guru yang telah dinyatakan profesional memiliki kepribadian yang dewasa, yang mana guru sudah menunjukan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kedua, guru dalam menunjukan profesionalitasnya guru memiliki kepribadian yang berwibawa, yang mana guru memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kedua sub-tema ini akan dijelaskan secara detail dibawah ini yang akan didukung oleh hasil wawancara berdasarkan hasil analisa data baik individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan-terlampir).

* + - 1. **Guru memiliki kemampuan Kompetensi Kepribadian dengan ditunjukan dengan memiliki kepribadian yang dewasa.**

Dalam kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru yang profesional terdapat diantaranya adalah guru yang memiliki kepribadian yang dewasa dalm hal ini guru menunjukan sikap kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Berdasarkan hasil obeservasi disekolah peneliti melihat secara langsung bagaimana guru guru yang sudah bersertifikasi sudah memiliki kepribadian yang deawa hal ini ditunjukan dengan bagaimana guru memperlakukan siswa dengan penuh kasih sayang dan menjalankan tugas dengan rasa yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian berdasarkan analisa data dari hasil wawancara bersama Tim supervisi dan Wakil kepala sekolah menunjukan hasil bahwa guru sudah memiliki kepribadian yang dewasa, sebagaimana Partisipan 1 ungkapkan dibawah ini,

“Untuk rekan rekan guru yang ada disekolah ini terutama untuk guru yang sudah bersertifikasi saya rasa sudah menjalankan tugasnya sebagai guru dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab...” (Partisipan1-Tema-2)

Apa yang diungkapkan oleh Partisipan 1 menggambarkan bahwa untuk guru yang sudah bersertifikasi sudah bersikap mandiri dalam menjalani tugasnya dan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam menjalani tugas, kemudian hal serupa juga disampaikan oleh peserta didik yang mana melihat secara langsung keseharian guru didalam kelas, hal ini sebagaimana partisipan 16 menyampain bahwa,

“Kalau ibu bapak itu, masuk kelas tepat waktu dan memang walaupun tinggal dijambi, bapak ibu guru datangnya tepat waktu dan semagat kalau mau ngajar tu.....” (Partisipan16- Tema2)

Secara garis besar partisipan 16 menggambarkan perilaku atau sikap guru yang bersertifikasi yang mengajar mereka didalam kelas, bahwa hampir keseluruhan memiliki semangat yang tinggi dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal ini juga digambarkan didalam Bagan 5 dibawah ini,

**Bagan 5: Temuan Tema 2 Sub Tema 1 Guru memiliki Kepribadian yang dewasa.**

* + - 1. **Guru memiliki kemampuan Kompetensi Kepribadian dengan ditunjukan dengan memiliki kepribadian yang berwibawa.**

Didalam Komptensi Kepribadian guru yang memiliki keprofesionalitas ditunjukan dengan memiliki kepribadian yang berwibawa, yang mana dimaksud berwibawah disini adalah guru yang mempunyai prilaku yang berpengaruh positif kepada peserta didik dan juga mempunyai perilaku yang disegani. Di dalam instansi tempat penelitian ini, dari observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat secara langsung bahwa guru guru yang ada disekolah tersebut terutama guru bersertfikasi memiliki kepribadian yang berwibawah, hal ini ditunjukan dari setiap siswa sangat menghormati guru guru yang ada juga beradasarkan hasil wawancara terdapat pernyataan dari analisa data bahwa beberapa guru yang bersertifikasi sudah menunjukan kepribadiaan yang berwibawah, namun tidak dipungkiri masih terdapat guru yang masih ditakuti oleh murid murid hal ini diakibatkan ketegasan yang diterapkan oleh guru, sebagaimana partisipan1 menyampaikan pernyataanya dibawah ini,

“Ya hampir rata rata rekan rekan guru disini sangat disegani para peserta didik, hanya saja masih ada beberapa yang masih ditakuti peserta didik, hal ini sering disampaikan peserta didik kadang bercerita didalam kelas tentang pengalaman belajarnya dengan beberapa guru. Namun memang Guru guru yang ada disekolah ini selalu menjunjung istilah Guru (di guguh dan ditiru) maka guru guru sudah menerapkan sikap positif didalam menjalankan tugasnya sehari hari agar peserta didik dapat meniru apa yang guru sehari hari perbuat.” (Partisipan1- Tema2)

Secara spesifik partisipan 1 menyampaikan bagaimana guru guru menunjukan keprofesionalitasanya dikehidupan sehari hari dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki sikap yang positif terhadap siapa saja baik itu kepada pesera didik maupun keteman sejawat, dengan sikap demikian membawa citra yang baik dimata peserta didik, juga diperkuat dengan apa yang disampaikan dengan partisipan 17 dalam wawancaranya meyatakan bahwa,

“Kalau ibu bapak itu memang sehari hari bersikap baik jadi kami segan untuk berkelakuan tidak baik, ibu bapak guru juga sering mengingatkan dan berpesan untuk kami berprilaku baik selayaknya siswa yang bersekolah harus menjunjung tinggi adab kata bu guru seperti itu....”(Partisipan 17-Tema2)

Dari apa yang disampaikan oleh partisipan 17 menggambarkan perilaku guru yang berwibawah, dan memiliki sikap dan pengaruh positif terhadap peserta didik sehingga peserta didik selalu mengingat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Hal ini tergambar didalam Bagan 6 dibawah ini.

**Bagan 6: Temuan Tema 2 Sub Tema 2 Guru memiliki Kepribadian yang berwibawah.**

* + 1. **Kompetensi Profesional- sebagai implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru**

Analisa data dalam penelitian ini menemukan kaitanya pada tema Kompetensi Profesional yang dimiliki guru terhadap implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitasnya terdapat satu sub-bab yaitu Guru telah mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Untuk sub-tema ini akan dijelaskan secara detail dibawah ini yang akan didukung oleh hasil wawancara berdasarkan hasil analisa data baik individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan-terlampir).

* + - 1. **Guru telah memiliki Kompetensi Profesional yang mana ditunjukan bahwa Guru telah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi**

Dalam Kompetensi Profesional terdapat beberapa indikator yang menggambarkan seorang guru memiliki kompetensi profesional, salah satunya adalah guru seorang ahli dalam materi pelajaran ilmiah yang relevan. Yang dimaksud dengan “menguasai substansi keilmuan” adalah guru telah memahami bahan ajar yang terdapat dalam kurikulum sekolah, konsep dan metode keilmuan yang mendasari terkait bahan ajar tersebut serta strukturnya, setelah itu guru juga memahami keterkaitannya. antar mata pelajaran terkait serta mampu menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagaimana analisa data dari wawancara beberapa guru bersertifikasi diinstansi tersebut yaitu salah satunya disampaikan oleh Partisipan 4 seperti dibawah ini,

“Dalam hal mengajar memang masih menggunakan beberapa metode atau model pembelajaran yang sama namun materi yang akan disampaikan jelas adalah materi pembelajaran yang sudah pasti saya kuasai sesuai bidang yang saya ampuh...” (Partisipan 4-Tema 3)

Dari hasil wawancara diatas, partisipan 4 menggambarkan keprofesionalitasannya sebagai guru yang bersertifikasi dengan kemahirannya dalam penguasaan materi dan bahan ajar disetiap proses pembelajaran, penelitijuga berkesempatan mewawancari partisipan selanjutnya yaitu partisipan ke 5 yang sebagaimana disampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut,

“Kalau saya, karena sering ikut pelatihan dan aktif di MGMP saya sedikit banyak memahami dan menerapkan metode dan strategi belajar yang saya dapat dalam pelatihan pengembangan kompetensi dan mengikuti MGMP mapel saya itu, jadi ketika proses pembelajaran pun saya menyesuaikan model model pembelajaran yang saya pakai tepat atau tidak dalam materi yang saya ajar, kemudian strategi pembelajaran apa yang tepat untuk membuat peserta didik saya aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan dikelas seperti itu.” (Partisipan 5-Tema 3)

Sebagaimana disampaikan partisipan 5 bahwa sebagai guru bersertifikasi beliau mengikuti beberapa pelatihan dan aktif MGMP matapelajaran hal itu ia lakukan untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru bersertifikasi setlah menjalani pendidikan dan latihan profesi guru sehingga sebagai guru bersertifikasi beliau menggambarkan sebagai guru yang memiliki kompetensi profesionalnya. Begitujuga disampaikan dengan partisipan 11 dalam hal profesionalitasnya yang ditunjukan dengan memiliki Kompetensi Porfesional yaitu memahami substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, sebagaimana disampaikan dibawah ini,

“Jelas, kalau saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu walaupun saya lulusan dari pendidikan agama, namun saya memilih jalur penguasaan keilmuan saya waktu PLPG itu saya ambil seni budaya karena saya meguasi bidang studi tersebut....kemudian terkait metode pembelajaran saya juga menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan...” (Partisipan 11-Tema3)

Hal ini disampaikan partisipan 11 selaku guru bersertifikasi dalam menunjukan implementasi kebijakan sertifikasi terhadap profesionalitasnya yang mana beliau menguasai substansi keilmuan yang ia ampuh didalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Hal ini juga tergambarkan didalam Bagan 7 dibawah ini.

**Bagan 7: Temuan Tema 3 Sub Tema 1 Guru menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi**

* + 1. **Kompetensi Sosisal- sebagai implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru**

Analisis data dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua sub bab yang berkaitan dengan masalah kompetensi sosial yang dimiliki guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan standar sertifikasi dalam keprofesionalannya. Guru terlebih dahulu dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa dengan baik. Kedua adalah Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif frngan orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Untuk sub-tema ini akan dijelaskan secara detail dibawah ini yang akan didukung oleh hasil wawancara berdasarkan hasil analisa data baik individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan-terlampir).

* + - 1. **Guru telah memiliki Kompetensi Sosial yang mana ditunjukan bahwa Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik**

Dalam kompetensi Sosial, guru diharapkan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik hal ini dimaksud adalah guru mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh partisipan 13 selaku guru bimbingan konseling yang sudah bersertifikasi, yang mana dalam tugasnya beliau lebih banyak mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa didalam lingkungan sekolah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat secara langsung bagaimana guru yang bersertifikasi mampu berkomunakaso dnegan baik dengan peserta didik dan juga sebagaimana beliau sampaikan didalam wawancaranya dibawah ini,

“Sebagai guru BK saya tidak mau siswa beranggapan bahwa saya polisi disekolah yang mereka harus takuti, melainkan saya menerapkan pola di pikrian siswa bahwa bersama guru BK mereka bisa berkeluh kesah terkait hal hal yang mengganggu kelancaran mereka selaku peserta didik dalam proses pembelajaran disekolah, maka saya menjalin komunikasi yang baik kepada siswa agar siswa lebih terbuka kepada saya sehingga saya dapat menganalisa permasalahan apa yang peserta didik alami baik itu sumber permasalahannya dirumah maupun disekolah....begitu” (Partisipan 13-Tema-4)

Secara spesifik partisipan 13 menyampaikan kemampuannya sebagai guru yang telah bersertifikasi dan sebagai guru bimbingan konseling harus lebih banyak berkomunikasi secara efketif dengan siswa, beliau tidak ingin merasa siswa tidak nyaman, sehingga beliau tidak merasa kesulitan dalam menjalinkomunikasi dan menganalisi permasalahan yang dihadapi siswanya, kemudia Partisipan 10 juga menyampaikan bahwa komunikasi yang baik yang terjalin antara guru dan peserta didik adalah kunci kesinambungan dan keharmonisan didalam sebuah sekolah, hal ini sebagaimana disampiakannya dibawah ini,

“Ya...sebagai guru saya secara rutin memang berkomunikasi dengan peserta didik saya, baik secara langsung maupun melalui grup whatsapp, kemudian memang untuk kasus kasus tertentu saya memang berkomunikasi secara langsung jika menemukan kendala terhadap cara belajar siswa, yaaa... bagaimana guru lah menjalin komunikasi yang baik kepada peserta didiknya agar peserta didik merasa nyaman dan percaya untuk mau terbuka kepada gurunya dan tidak merasa takut kepada gurunya.”(Partisipan 10- Tema-4)

Hasil wawancara bersama partisipan 10 menunjukan bahwa beliau sebagai guru yang bersertifikasi mampu menjalin komunikasi yang baik kepada peserta didiknya, hal itu dilakukan agara peserta didik merasa lebih dekat dan bisa terbuka kepada guru tersebut dan tidak merasa takut, senada juga disampaikan oleh partisipan 5 terkait cara menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa nya disekolah, sebagaimana pernyataannya dibawah ini,

“ Kalau saya, yang penting jangan membuat mindset peserta didik saya itu takut kepada saya, karena guru merupakan orang tua siswa disekolah, kalau dy merasa takut kepada siapa akan mau bercerita jika mengalami permasalahan disekolah atau pun dirumah, apalagi jika siswa ada yang memang tinggal bersama nenek atau orang tua nya sudah tidak lengkap lagi, nah ini perlu perhatian ekstra untuk diajak komunikasi karena jika mereka menghadapi permasalahan mereka cendrung tertutup maka disitulah pentingnya peran guru dan kedekatan guru menjalin komunikasi kepada siswa, agar siswa merasa lebih nyaman untuk bercerita.” (Partisipan 5- Tema4)

Berdasarkan hasil wawancara bersama partisipan 5, belia menunjukan profesionalitasnya sebagai guru bersertifikasi dengan cara menanamkan rasa percaya siswa kepadanya bahwa sebagai guru adalah orang tua siswa juga disekolah, sehingga siswa bisa lebih terbuka dan mau bercerita kepada guru. Hal ini juga digambarkan di Bagan 8 dibawah ini,

**Bagan 8: Temuan Tema 4 Sub Tema 1 Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik**

* + 1. **Peran Kebijakan Sertifikasi terhadap Profesionalitas Guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi**

Peran sertifikasi yang disampaikan oleh Fajar (2006) yakni guru/dosen lebih mengerti hak dan kewajiban dalam (UU No.14 Tahun/ 2005 pasal 14 ayat 1 sebagai berikut 7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, 1) memperoleh penghasilan di atas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial, 2) memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, 3) memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, 4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri, 5) Memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana pembelajaran untuk membantu terlaksananya tanggung jawab keprofesian secara efisien, 6) Sesuai dengan pedoman pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, 7) mempunyai kebebasan menilai peserta didik dan ikut memutuskan lulus, menerima penghargaan, atau menghadapi sanksi; 8) Mereka juga memiliki kebebasan untuk bergaul dengan profesional lain dalam organisasi profesi 9) kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan; 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, juga 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Terkait pertanyaan penelitian kedua yaitu peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi ini menunjukan bahwa terdapat berbagai informasil atau data baru terhadap peran kebijakan sertifikasi ini dalam profesionalitas guru. Dari hasil data wawancara yang dilakukan penelitian terhadap Tujuh Belas partisipan atau informan menunjukan bahwa terdapat berbagai informasi atau data baru terhadap Peran Kebijakan Sertfikasi dalam Profesionalitas Guru di lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Analisa data dilakukan biak secara individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan terlampir) menunjukan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terdapat Tiga (tema) atau kategori yang berkaitan Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru sebagai temuan utama dalam penelitian studi kasus kualitatif di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil Penelitian ini dibagai menjadi tiga tema, yaitu 1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, 2) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 3) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, sebagaimana tergambar dalam gambar 4.5 dibawah ini.

**Gambar 4.5** dibawah ini menunjukan hasil temuan berkaitan dengan tema peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru dalam hal ini menghasilkan poin poin sebagai berikut.

**Gambar 4.5** Tema : Peran Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru

Gambar 4.5 menunjukan terdapat 3 tema berkaitan dengan peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru. Adapun tema pertama adalah memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minim dan jaminan kesejahteraan sosial. Tema kedua adalah memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan tema ketiga yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

* + - 1. **Peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru- memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minim dan jaminan kesejahteraan sosial.**

Hasil penelitian kualitatif studi kasus dalam kaitannya dengan temuan pada tema setiap guru bersertifikasi memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minim dan jaminan sosial, dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait temuan tema ini, beberapa partisipan yang diwawancarai menyatan dari kebijakan sertifikasi ini sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup yang minim, hal ini disampaikan oleh Partisipan 7 dalam wawancaranya sebagai berikut,

“Alhamdulillah, dengan adanya sertifikasi ini, sangat menolong saya karena saya mendapat tambahan penghasilan, namun ini juga harus diiringi dengan tanggung jawab dan kesungguh sungguhan dalam menjalani tugas saya sebagai guru....” (Partisipan 7-Tema1)

Hasil wawancara yang dilakukan bersama partisipan 7 ini menggambarkan begitu besar peran sertifikasi ini terhadap kesejahteraan guru, karena hal ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap usaha dan kerja keras guru sebagai tenaga pendidik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Partisipan 9 yang mana menyampaikan rasa syukurnya terhadap adanya kebijakan sertifikasi ini, yang memberikan kesejahteraan bagi kehidupanny, sebagaimana pernyataanya dibawah ini,

“Ya sangat tertolong sekali, dengan adanya kebijakan sertifikasi ini, karena kita tau dulu gaji guru itu dulunya kecil, namun pemerintah sekarang mengeluarkan Undang undang guru dan dosen, sehingga adanya penghargaan utuk guru profesional dengan tambahan diluar gaji, jadi sangat bersyukur sekalilah...mendapat kesempatan dan lulus sertifikasi ini.”(Partisipan 9-Tema1)

Dari hasil wawancara bersama partisipan 9, sebagai guru memang peran kebijakan sertifikasi ini sangat menolong mengangkat derajat guru dengan tugas pokok yang diemban sangatlah besar yaitu mencerdaskan anak bangsa, maka pemberian tunjangan diluar gaji pokok ini adalah suatu penghargaan yang sangat diharapkan oleh guru guru karena dapat membantu kesejahteraan guru. Selanjutnya, sejalan apa yang disampaikan dengan partisipan 9 terkait memperoleh penghasilan diatas kehidupan yang minin ini, partisipan 12 juga menyampaikan pendapatnya terkait hasil tersebut, hal ini sebagimana dengan pernyataannya dibawah ini,

“Ya.... benar benar tertolong sekali, apalagi kami guru didaerah ini, sangat tertolong sekali, karena gaji pokok saja terkadang tidak mencukupi kebutuhan sehari hari ditengan himpitan ekonomi yang tinggi, jadi dengan adanya pemberian tambahan penghasilan ini sangat menolong kami sebagai guru ini dalam mensejahterahkan kehidupan kami didaerah ini.”(Partisipan 12- Tema1)

Menurut partisipan 12, pemberian tambahan penghasilan ini sangat lah membantunya sebagai guru yang mengjar disekolah didaerah karena memang secara detail disampaikan kebutuhan transpor dan perawatan kendaraan yang digunakan sehari hari untuk mengajar lebih besar pengeluarannya, karena dari rumah menuju kesekolah medan dan jaraknya sangat luar biasa. Sehingga dengan adanya kebijakan sertifikasi ini sangat membantu beliau dalam meningkatkan kesejahteraannya sebagai guru yang mengajar didaerah. Hal ini tergambar dalam Bagan 9 dibawah ini.

**Bagan 9: Temuan tema 1- guru- memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minim dan jaminan kesejahteraan sosial.**

* + - 1. **Peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru-memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi**

Dalam proses pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) atau pun Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan atau pun Prajabatan (PPG), guru yang dinyatakan layak atau lulus dalam ujian pre-test, akan melaksanakan pendidikan penguatan profesi guru selama beberapa waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana program profesi guru yang telah ditunjuk. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap guru yang terpilih untuk mendalami pembelajaran terkait tugasnya sebagai guru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Partisipan 11dibawah ini,

“Ya, saya merasa beruntung sekali karena mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, banyak sekali hal hal yang saya tidak ketahui dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru ini yang saya dapatkan selama masa pendidikan. Jadi saya merasa sangat bersyukur dengan adanya kebijakan sertifikasi ini sangat bermanfaat sekali buat saya.”(Partisipan 11- Tema2)

Apa yang diungkapkan partisipan 11 menggambarkan bahwa guru yang berkesempatan melaksanakan pendidikan profesi guru, memiliki banyak keuntungannya, karena didalam proses pendidikan guru dibekali banyak ilmu untuk menunjang kompetensi guru, Partisipan 6 pun mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut,

“Selama saya mengikuti pendidikan profesi guru selama 4 bulan, benar benar saya merasakan banyak sekali hal hal yang penting yang saya tidak ketahui menjadi tau, mulai dari membuat RPP yang benar sesuai sintaksnya, memahami model model pembelajaran inovatif, metode pembelajaran dan membuat media pembelajaran yang menarik, ini merupakan kesempatan yang berharga.” (Partisipan 6- Tema2)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, partisipan 6 merasa sangat senang mengikuti pendidikan profesi guru karena, dalam proses pendidikan banyak hal hal yang bermanfaat yang dipelajari dan ini sangat membantu beliau dalam meningkatkan kompetensi nya sebagai guru yang profesional. Kemudian partisipan 5 juga menyampaikan rasa puasnya dengan kebijakan sertifikasi ini yang mana guru diberi ruang dan kesempatan untuk belajar lagi memperdalam kemahirannya dalam proses menjalankan tugas, adapun pernyataannya sebagai berikut,

“Saya senang sekali ketika saya diberi kesempatan untuk belajar lagi, saya merasa beruntung karena bisa mengikuti pendidikan dan latihan profesio guru selama 14 hari, disana saya diberikan banyak bekal dan ilmu yang bermanfaat yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan kepotensi diri saya sebagai guru dan juga bisa saya implementasikan di kegiatan belajar mengajar saya dikelas.” (Partisipan 5-Tema-2).

Apa yang diungkapkan oleh partisipan 5 menggambarkan bahwa guru yang mengikuti program pendidikan dan latihan profesi guru, memang diberikan kesempatan untuk belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan terkait tupoksinya sebagai guru, hal ini menjadi kesempatan bagi beliau untuk meningkatkan kompetensi nya sebagai guru yang profesional. Hal ini digambarkan didalam Bagan 10 dibawah ini,

**Bagan 10: Temuan tema 2: guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi**

* + - 1. **Peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru - memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan**

Dalam proses pembelajaran, sarana prasarana merupakan hal yang penting bagi guru yang mana berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Partisipan 1dibawah ini,

“Memang seharusnya sarana prasarana dalam pembelajaran memang lah hal yang penting, namun kembalilagi bagaimana sekolah menyanggupi ketersediaan sarana dan prasarana disekolah, karena disekolah kami memang tidka dipungkiri sarana prasarana masih terbatas, sehingga meskipun kualitas guru kami sudah mempuni, hal ini tidka bisa berjalan secara maksimal karena sarana dan prasarana belum dilengkapi dengan baik, semoga kedepannya sekolah bisa melengkapi sarana dan prasarana dengan baik.” (Partisipan1- Tema3)

Dari penjelasan partisipan 1 menyatakan bahwa peran kebijakan sertifikasi ini dalam menunjang profesionalitas guru terkait pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran memang belum maksimal karena sarana prasarana belum seluruhnya lengkap sehingga proses pembelajaran memang masih memanfaatkan sarana prasarana yang ada saja. Senada dengan pernyataan partisipan 1, partisipan 8 pun menyampaikan hal yang sama dalam wawancaranya dibawah ini,

“Ya, kami sangat terbatas kalau masalah sarana prasarana, hanya tidak menjadikan hal itu hambatan bagi saya untuk tetap memberi pembelajaran yang baik kepada peserta didik saya, apa yang bisa saya siapkan terkaid media pembelajaran jika memang tidak disediakan disekolah, maka saya secara mandiri mempersiapkannya.” (Partisipan 8-Tema-3)

Hasil wawancara bersama partisipan 8 menggambarkan bahwa terkait profesionalitasan beliau sebagai guru, tetap ia utamakan walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasaran yang kurang memadai di sekolah, kemudia hal lain juga disampaikan oleh partisipan 11 sebagaimana dalam wawancaranya dibawah ini,

“Sarana prasarana masih belum kami nikmati secara maksimal, karena sekolah belum menyediakan sarana prasaran yang lengkap, semoga kedepannya bisa dilengkapilah sarana prasarana ini, karena ini sangat mendukung proses pembelajaran dan kemaksimalan kami sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran juga bisa didukung dengan adanya sarana dan prasaran yang lengkap disekolah.”(Partisipan11- Tema3)

Dalam wawancara bersama partisipan11, dapat digambarkan bahwa harapan besar beliau untuk sekolah dapat melengkapi sarana prasaran untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, karena memang pemanfaatan sarana dan prasarana ini sangat memberikan nilai positif dalam proses penyampaian materi kepada siswa, hal ini juga digambarkan dalam Bagan 11 dibawah ini,

**Bagan 11: Temuan Tema 3 : Guru memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan**

**4.3.6 Kendala yang dihadapi guru guru sehubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru di Salah Satu Sekolah Menangah Pertama Kabupaten Muaro Jambi**

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan guru guru juga dengan wakil kepala sekolah, yang dilakukan pada tanggal 24 November 2022 mengenai kendala kendala yang dihadapi guru sehubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas guru, sejauh ini mengalami kendala dimana kondisi sekolah yang merupakan tipe jenis sekolah menengah dengan jumlah peserta didik kurang dari 200 orang, dengan memiliki 8 rombel dan memiliki guru yang bersertifikasi sejumlah 13 orang dimana didalam satu matapelajaran terdapat 1-2 orang guru yang bersertifikasi, guru merasakan kebijakan sertifikasi ini sedikit menyulitkan guru yang mana guru harus memenuhi beban mengajar 24jam, sementara keadaan sekolah yang memiliki jumlah rombel yang sedikit sehingga untuk guru yang kekurangan beban mengajr kurang dari 24 jam mengajar, harus menacari tambahan jam mengajar diluar sekolah induk atau mengambil tugas tambahan sehingga hal tersebut dirasa cukup mengganggu guru untuk fokus dalam menjalani tugasnya hal ini juga mengingat untuk mencari jam tambahan diluar sekolah induk sangatlah sulit dikarenakan letak geografis Kabupaten Muaro Jambi ini hampir seluruh sekolahnya berada berjauhan sehingga memerlukan usaha yang sangat besar untuk mencapai satu sekolah kesekolah lain untuk menjalani tugas mengajar tambahan diluar sekolah induk.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan persoalan lain yang kerap menimpa para guru di sekolah. Hal ini sedikit banyak berdampak pada proses pelaksanaan pembelajaran yang terkendala dan seringkali membosankan, karena terlihat bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK belum optimal dalam pemberian bahan ajar oleh guru. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak guru-guru yang mana dalam wawancara bersama partisipan 4 menyampaikan :

“.......Tidak cukup saja guru berupaya mengembangkan profesionalitasny, jika tidak didukung oleh kelengkapan alat alat atau sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sehingga membuat ruang guru untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar terbatas.” (Partisipan 4)

“.....Banyak guru yang memiliki skill atau kemampuan yang mempuni yang menunjukan keprofesionalitasannya sebagai guru yang memahami pembelajaran abad 21, namun hal ini tidak cukup jika prasarana dan sarana tidak tersedia” (Partisipan 11)

“..........Untuk kedepannya dari pihak sekolah, kami sebagai guru matapelajaran, ya mohon untuk dilengkapi masalah sarana dan prasarana, sehingga dalam Bapak ibu untuk khususnya saya matapelajaran Prakarya dalam mengajar untuk mengikuti teknologi yang sekarang sudah canggih itu bisa berjalan dengan lancar” (Partisipan 10)

Dari hasil wawancara bersama beberapa partisiapan, tergambarkan bahwa sarana dan prasarana lah yang menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan penunjangan profesionalitas guru dalam menjalani tugasnya dalam pembelajaran. Namun untuk kendala-kendala yang dihadapi tersebut, sudah diupayakan untuk diatasi walaupun belum maksimal.

* + 1. **Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Muaro Jambi terhadap Implementasi kebijakan Sertifikasi dalam profesionalitas guru.**

Berdasarkan temuan wawancara yang telah dilakukan, terdapat alternatif solusi atas tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi profesionalisme guru di sekolah. Secara khusus, sekolah harus berupaya memenuhi kebutuhan sarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kondisi pembelajaran abad 21 secara bertahap dan berkesinambungan, seperti melalui perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dan yang tersedia secara bijaksana baik melalui swadaya, subsidi pemerinta seperti Bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan sejenisnya. Tentu saja, ini juga membutuhkan kolaborasi guru-siswa saat mereka saling mencari sumber belajar mengajar sambil menunggu upaya sekolah membuahkan hasil. Dengan kata lain, diharapkan kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini sebagaimana Partisipan 5 menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Harapan guru guru disekolah ini tidka muluk muluk, ya mudah mudahan sekolah bisa melengkapilah sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, karena ini lah solusi yang tepat agar pelaksanaan tugas guru didalam kelas bisa lebih optimal lagi” (partisipan 5)

Kemudian mengajukan usulan ke dinas terkait masalah penugasan guru untuk dapat ditinjaukembali untuk beban kerja guru 24jam dengan kondisi tipe sekolah menengah yang mana hanya memiliki 8 rombel dan jumlah siswa kurang dari 200 siswa, agar dapat menunjang pelaksanaan tugas guru secara maksimal kedepannya. Sebagaimana partisipan 1 menyampaikan dalam wawancaranya,

“Ya harapan kami, para pembuat kebijakan dapat meninjau kembalilah mengenai kebijakan sertifikasi ini, karena kondisi keadaan sekolah tiap daerah itu berbeda sehingga untuk sekolah yang memiliki rombel sedikit dan siswa sedikit akan kesulitan bagi guru memenuhi 24 jam beban kerja.” (Partisipan 1)

Itulah beberapa solusi terkait permasalahan yang dihadapi salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Muaro Jambi terhadap implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru yang mana disampaikan melalui wawancaranya.

### 4.4 Pembahasan

Guru dan dosen dapat memperoleh sertifikasi pendidik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005. Istilah sertifikasi dapat dipahami sebagai sertifikat dari lembaga yang berwenang yang diberikan kepada profesinya, sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) mengenai kelayakan profesi tersebut. untuk melakukan tugas. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sertifikasi menjelaskan proses pengakuan suatu profesi sebagai bukti kewenangan untuk menjalankan profesinya. Guru adalah agen perubahan karena tindakan, sikap, dan strategi pengajaran mereka dapat meningkatkan atau bahkan merusak pembelajaran siswa. Pernyataan ini menyiratkan bahwa profesionalisme instruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik seorang siswa dididik. Pendidikan berkualitas tinggi tidak akan terwujud tanpa kinerja guru yang terampil.

Juga diatur dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, Seorang guru harus memiliki empat kompetensi—pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional—yang diperolehnya melalui pendidikan profesi. Seiring dengan memiliki kredensial akademik, keterampilan, dan sertifikasi; sehat secara fisik dan psikologis; dan mampu memenuhi tujuan pendidikan nasional

Berangkat dari kerangka teori dari landasan hukum UU Guru dan Dosen no 14 tahun 2005, menunjukan hasil analisa data yang dilakukan baik secara individu (setiap partisipan-terlampir) maupunanalisa data antar individu (semua partisipan-terlampir) menunjukan bahwa untuk pertanyaan penelitian pertama menunjukan ada 4 tema besar dan juga memiliki 7 subtema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru. Tema utama pertama yakni (1) Guru yang memiliki Kompetensi Pedagogik degan empat sub-tema, (2) Guru yang memiliki Kompetensi Kepribadian dengan dua sub-tema, (3) Guru memiliki Kompetensi Profesional dengan satu sub-tema, dan (4) Guru memiliki Kompetensi Sosial dengan tiga sub-tema

Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian kedua ditemukan 3 tema terkait peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru, yang mana untuk temanya yaitu 1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, 2) mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 3) mendapatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kelancaran tugas keprofesionalan.

* + 1. **Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru**

Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan sertifikasi meghasilkan 4 temua tema dengan tujuh subtema dengan mengarah ke Undang Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi. Ini merupakan bukti bahwa implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi sudah berjalan dengan baik melalui pembuktian bahwa guru yang berseertifikasi sudah memiliki keempat kompetensi guru untuk menunjang profesionalitasnya.

* + 1. **Peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru**

Temuan dari penelitian tentang bagaimana kebijakan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme guru mengidentifikasi tiga tema: 1) memperoleh penghasilan di atas jumlah minimal yang diperlukan untuk subsisten dan asuransi jaminan sosial; 2) memperoleh kesempatan untuk memajukan kompetensi seseorang. 3) memperoleh dan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran untuk mendukung kegiatan profesionalisme yang efisien, hal ini merujuk dalam kajian teori yang bersumber dari UU No.14 Tahun/ 2005 pasal 14 ayat 1 yang mana menyebutkan bahwa 1) Mendapatkan penghasilan di atas jumlah minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya hidup dan asuransi jaminan sosial merupakan salah satu cara kebijakan sertifikasi berkontribusi pada profesionalisme guru; 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tempat kerja; 3) Mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan pelaksanaan tugas; 4) Memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kompeten; 5) Memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas keprofesian; 6) Bebas mengambil keputusan dan ikut serta dalam menyeleksi peserta didik untuk kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi sesuai dengan kebijakan pendidikan, kode etik guru, dan persyaratan hukum dan peraturan; 7) merasa terlindungi dan terjamin keselamatannya selama melakukan pekerjaan; 8) memiliki kebebasan untuk bergabung dengan kelompok profesional; 9) memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan dibuat; 10) Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kredensial dan kompetensi akademik mereka; atau 11) Menerima pengembangan dan pelatihan profesional di bidang keahliannya. Namun, hanya 3 tema yang teridentifikasi dalam studi ini sebagai hasil dari persepsi peserta tentang kontribusi sertifikasi terhadap keahlian mereka, yang hanya mencakup 3 elemen tersebut.

Hasill penelitian ini menggambarkan bahwa peran kebijakan sertifikasi ini yang dirasakan oleh guru di instansi tersebut adalah memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, para partisipan penelitian menyatakan rasa syukurnya karena dengan adnaya kebijakan sertifikasi guru, kesejahteran sosial para guru terbantu dengan memperoleh penghasilan tambahan, kemudian Partisipan juga menyatakan bahwa peran kebijakan sertifikasi ke dua yang dirasakan adalah para guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan latihan profesi guru yang dijalankan oleh guru selama masa pendidikan, hal ini sangat bermanfaat guna meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya peran kebijakan sertifikasi terakhir yang dirasakan oleh guru adalah memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, namun untuk peran kebijakan sertifikasi ini belum dirasakan secara maksimal, karena kondisi sekolah belum menyediakan sarana prasarana yang lengkap yang bisa dimanfaatkan para guru dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah. Namun hal ini dapat dijadikan masukan kepada instansi tersebut agar kedepannya dapat segera memenuhi sarana dan prasarana disekololah dengan baik.

BAB V

PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program sertifikasi sudah terimplementasikan dengan baik dimana sertifikasi berpengaruh dengan baik terhadap profesionalitas guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi yang dibuktikan dengan adanya guru memiliki 4 kompetensi inti guru yang didapat memalui pendidikan profesi. Dalam pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas guru di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi mengalami kendala yaitu penyediaan fasilitas sarana dan prasarana masih terbatas juga untuk pemenuhan beban kerja 24 jam masih terdapat guru kesulitan mencari jam tambahan diluar sekolah induk dikarenakan akses kesekolah lain cukup jauh. Untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi sehubungan dengan Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi tersebut, sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan maka adapun alternatif solusinya adalah dengan cara sekolah dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai dan relevan dengan pembelajaran abad 21 secara bertahap melalui perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana yang tersedia, baik dari swadaya atau subsidi pemerintah Kemudian menyampaikan usulan terkait kebijakan sertifikasi guru mengenaik kondisi sekolah tipe menengah dengan jumlah siswa yang tidak banyak untuk dapat dikaji kembali aturan pemenuhan beban kerjanya, dikarenakan masih ada guru yang masih kekurangan jam mengajar dan harus mencari tambahan jam mengajar di luar sekolah. Dan mengingat letak geografis kabupaten muaro jambi yang antar wilayah cukup jauh sehingga membuat guru mengalami kesulitan untuk menjangkau tiap sekolah untuk menambah jam mengajar.
2. Terkait peran sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru, guru merasakan ada 3 peranan yang sudah dirasakan selama ini yaitu memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, kemudian memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan yang terakhir yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas.

## Saran

Dari simpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

Untuk pihak Sekolah, dari ketiga komponen baik siswa, guru maupun sekolah harus saling mendukung kebijakan sertifikasi guru. Siswa sebaiknya lebih aktif dalam mempersiapkan dan mencari sumber belajar sendiri begitu juga dalam proses belajar. Untuk guru sebaiknya mampu untuk menghadapi tantangan global untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru yang guru nantinya dapat saling bekerja sama dalam hal mengembangkan media pembelajaran agar dapat memudahkan guru dalam proses belajar mengajar. Untuk sekolah juga sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalanya tugas guru guna mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu pimpinan sekolah juga perlu untuk melakukan pengontrolan serta mengevaluasi guru maupun siswa untuk mendukung keberhasilan kebijakan sertifikasi guru. Juga yang terakhir, diharapkan untuk kebijakan sertifikasi sendiri dapat diterapkan peraturan yang berbeda tiap daerah, karena kondisi sekolah didaerah tidak lah sama dengan kondisi di kota kota besar, didaerah sekolah memiliki tipe kondisi atas, menenngah dan kecil yang mana tidak semua sekolah memiliki jumlah rombel dan siswa yang banyak, sehingga untuk memenuhi persyaratan beban kerja 24 jam untuk sekolah didaerah itu memang cukup sulit jika kondisi sekolah memiliki jumlah siswa sedikit dan rombel yang tidak banyak.

# DAFTAR PUSTAKA

Ahmad & Sujianto (2022), Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru.

Arsyad, A (2015). *Professionalism, Professionality and the Development of Education Professionals*. www. education. leeds. ac.uk. The University of Leeds, England. The topic was chosen and quoted as well as downloaded from the internet prepared in Makassar, 23rd February 2015, hal. 5.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (2nd ed)”*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2010). *Research design:*  *Qualitative, quantitave and mix method”*. Thousand Oaks, CA : Sage Publication.

Creswell, J. W. (2011). *Educational research : Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed*). Boston: Pearson Education, Inc.

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI , Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI. (2006).

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2005)

Djaali. (2017). Peningkatan mutu pendidikan nasional melalui program sertifikasi*.* Edukasi : *Jurnal penelitian pendidikan agama dan keagamaan.*

Fajar, A. (2006). Peranan sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru. Disajikan dalam seminar nasional sosialisasi sertifikasi guru dalam memaknai UU No.14 Tahun 2005. Bandung: Disdik Jawa Barat

Fatah, N. (2011). Landasan manajemen pendidikan (Edisi XI). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Gulo. (2002), Metodologi penelitian. Jakarta: Grasindo.

Harris, B. M. (1990). *Improving staff performance through in-service education*.

Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.

Johnson, B & Christensen, L. B (2008). *Educational research: Quantitative, qaulitative, and mix approaches (3rd ed)* Boston: Sage Publication.

Kunandar. (2007). *Guru profesional: Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTPS) dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kurniawan, B. A (2011). Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru di kota Yogyakarta. Edukasi: *Journal of Government and Politics .*

Lincon, Y., S & Guba, E.Y. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: Sage publication.

Latiana, L. (2019) . Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. Edukasi: *Journal.Unnes.ac.id.*

Mujib, F. (2012). Kegiatan belajar mengajar yang super efektif: Tips-tips menjadi guru super. Yogyakarta: Diva Press.

Merriam, S. B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mulyasa, E. (2006). *Menjadi guru profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E (2009). Standar kompetensi dan sertifikasi guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nafis, A. H. S (2010), Pendidikan madrasah: dimensi profesional dan kekinian. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Namsa, M. Y. (2006). *Kiprah baru profesi guru Indonesia wawasan metodologi pengajaran agama Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan.

Nasution, S. (1999), *Kurikulum dan pengajaran (Cet-ke-3*), Jakarta: Bumi Aksara,.

Nurdin, S. (2002). Guru professional dan implementasi kurikulum. Ciputat: Press.

Ma`arif, S (2011) , Pola pengembangan kompetensi guru MI. Semarang: Walisongo

Salim, P. (1991). *The contemporary: English Indonesia dictionery*. Jakarta: Modern English Press

Samani, Muchlas, & Hariyanto. (2012). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: Remaja rosdakarya.

Sarimaya, F . (2008). Sertifikasi guru: Apa, mengapa dan bagaimana?. Bandung: Yrama Widya.

Soetjipto. (2004). *Profesi keguruan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Solichin, A. W. (2005). Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A. G. (2005), Analisis kebijakan publik, Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sudjana, N. (1987). Dasar-dasar proses belajar mengajar. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Sutrisno, H. (2002), *Metodologi reserc*h. Yogyakarta:Andi Ofset.

Trianto, & Tutik, T. T. (2007). *Sertifikasi guru dan upaya kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan,* Jakarta: Prestasi pustaka.

Weihrich, H & Koontz, H (1993). Management a.global perspective (tent edition). New York : McGraw-Hill, Inc.

Wijaya, C (1994) , Kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Bandung : Remaja rosdakarya.

LAMPIRAN A

**SURAT UNDANGAN UNTUK BERPARTISIPASI**

**DALAM PENELITIAN**

**Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru : Studi Kasus di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi**

**Dengan hormat**,

Saya, Siti Badriah, mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesedian Bapak/Ibu/Saudari/Saudara untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian tesis S2 saya berjudul, “Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru: Studi Kasus di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro jambi.” Adapun Tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru.

Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudari/Saudara akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara. Jika Bapak/Ibu/Saudari/Saudara bersedia, saya akan mengirimkan SURAT KESEDIAN (INFORMED CONSENT FORM). Data Bapak/Ibu/Saudari/Saudara akan dirahasiakan dan kesedian Bapak/Ibu/Saudari/Saudara dalam penelitian ini sangat saya harapkan dan hargai.

Terimakasih atas perhatiannya dan kesediannya.

Salam Hormat,

**Siti Badriah**

LAMPIRAN B

**SURAT KESEDIAN**

**(INFORMED CONSENT FORM)**

**Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru : Studi Kasus di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi**

**Dengan hormat**,

Saya, Siti Badriah, mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesedian Bapak/Ibu/Saudari/Saudara untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian Tesis S2 saya berjudul, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI DALAM PROFESIONALITAS GURU: STUDI KASUS DI SALAH SATU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUARO JAMBI.” Adapun Tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru.

Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudari/Saudara akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara. Data hasil wawancara Bapak/Ibu/Saudari/Saudara akan dirahasiakan dan akan disimpan dimana hanya peneliti yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu data Bapak/Ibu/Saudari/Saudara akan dimusnahkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudari/Saudara untuk terlibat dalam penelitian ini sepenuhnya sukarela. Bapak/Ibu/Saudari/Saudara setiap saat bisa mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancari atau menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Juga keterlibatan dalam penelitian ini tidak akan berdampak finansial dan tidak membahayakan keselamatan Bapak/Ibu/Saudari/Saudara. Mohon Bapak/Ibu/Saudari/Saudara simpan Salinan surat ini dan kapan saja memerlukan penjelasan tentang penelitian ini silakan kontak saya.

**PERNYATAAN KESEDIAN**

Saya sudah membaca diskripsi tentang penelitian ini dan saya sudah diyakinkan oleh peneliti bisa mengajukan pertanyaan di masa yang akan dating dan bisa mengundurkan diri kapan saja. Dengan ini saya menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan saya akan simpan Salinan surat kesediaan ini.

Tanda tangan peserta penelitian Tempat dan Tanggal

Tanda tangan Peneliti Tempat dan Tanggal

LAMPIRAN C

PROTOKOL WAWANCARA

TERHADAP GURU TERSERTIFIKASI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **ISU UTAMA** | **SUB ISU** | **PERTANYAAN** |
| 1  Kusnandar (2017:214) Profesionalitas adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental  dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk mewujudkan kualitas profesionalitasnya | | | |
| 1 | **Kompetensi Pedagogik Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik.** | 1. Kemampuan memahami  karakteristik anak | * *Bagaimana cara bapak*   */ ibu memahami karakteristi anak didik?* |
| 2. Kemampuan menangani kesulitan siswa belajar | * *Bagaimana bapak/ibu menghadapi anak yang memiliki kesulitan*   *belajar?* |
| 2 | **Kompetensi Profesional Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007, mengemukakan bahwa kompetensi profesional.** | 1. Penguasaan materi, model pembelajaran inovatif, teknik/strategi serta bahan ajar? | * *Apakah acuan yang bapak/ibu gunakan dalam menentukan materi dan apakah semua guru sertifikasi telah menguasai materi pembelajaran dan dapat*   *menerapkan model- model pembelajaran inovatif sesuai pembelajaran abad 21?* |
|  |  | 2. Penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK | * *Media apa saja yang bapak gunakan dalam proses mengajar? Apakah semua media yang bapak/ibu gunakan sudah berbasis TPACK dan apakah sudah dapat diterapkan di kelas?* |
|  |  | 3. Menyusun RPP yang sesuai dengan standar kompetensi | * *Apakah bapak ibu sudah menyusun RPP sesuai dengan sintaks model pembelajarannya, dan menyesuaikan dengan KKO serta mengaju kepada HOTS?* * *Apakah bapak/ibu mengalami kesuli dalam menyusun RPP?* |
| 3. | **Kompetensi Kepribadian Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 mengemukakan bahwakompetensi kepribadian** | 1. Kepribadian yang disiplin | * *Menurut bapak/ibu bagaimana bapak/ibu menerapkan kedisplinan dalam menjalankan tugas?* |
|  |  | 2. Kepribadian yang bertanggung jawab | * *Menurut bapak/ibu bagaimana bapak ibu menunjukan sikapbertanggung jawab terhadap tugas yang diampuh?* |
|  | **Peran Sertifikasi dalam profesionalitas guru** |  | * *Menurut Bapak /ibu apa peran sertifikasi yang sudah bapak ibu rasakan selama ini?* |

LAMPIRAN D

PROTOKOL WAWANCARA

TERHADAP KEPALA SEKOLAH/ WAKIL KEPALA SEKOLAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | ISU | Pertanyaan |
| 1 | **Kebijakan Sertifikasi Guru**  **Dan Profesionalitas guru** | 1. *Apakah menurut bapak ibu, guru guru yang suah menerima sertifkasi, sudah memenuhi persayaratan sertifikasi dengan baik?* 2. *Bagaimana dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi yang ada disekolah bapak ibu supervisi, apakah sudah berjalan dengan baik?* 3. *Jika belum apa kendala yang bapak ibu rasakan?* 4. *Apakah pihak sekolah mengalami kesulitan dalam mengatur pemenuhan beban kerja terhadap guru yang sudah bersertifikasi sesuai dengan peraturan kebijakan sertifikasi yang berlaku?* 5. *Apa solusi dari sekolah untuk guru guru yang tidka mencukupi jam mengajar yang sudah diatur dalam kebijakan sertifikasi guru?* 6. *Apakah guru guru disekolah bapak ibu yang sudah menerima sertifikat pendidik dan dinyatakan lulus menjadi guru profesional sudah konsisten untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru?* 7. *Apa upaya sekolah dalam membantu guru meningkatkan profesionalitas guru?* |

LAMPIRAN E

PROTOKOL WAWANCARA

TERHADAP TIM SUPERVISI SEKOLAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **ISU UTAMA** | **SUB ISU** | **PERTANYAAN** |
| Kusnandar (2017:214) Profesionalitas adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk mewujudkan kualitas profesionalitasnya | | | |
| 1 | **Kompetensi Pedagogik Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik.** | 1. Kemampuan memahami karakteristik anak | * *Menurut bapak/ibu, apakah semua guru yang tersertifikasi telah memahami karakteristik anak didiknya?* |
| 1. Kemampuan menangani kesulitan siswa belajar | * *Menurut bapak/ibu, apakah guru yang telah tersertifikasi mampu dalam menanggani anak didiknya yang mengalami kesulitan dalam belajar?* |
| 2 | **Kompetensi Profesional Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007, mengemukakan bahwa kompetensi profesional.** | 1. Penguasaan materi, model pembelajaran inovatif, teknik/strategi serta bahan ajar? | * *Menurut bapak/ibu apakah guru yang tersertifikasi sudah mampu dalam menentukan materi dan apakah semua guru sertifikasi telah menguasai materi pembelajaran dan dapat menerapkan model- model pembelajaran inovatif sesuai pembelajaran abad 21?* |
|  |  | 1. Penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK | * *Menurut bapak/ibu apakah Media yang digunakan guru tersertifikasi sudah bervariasi dan berbasis TPACK?* |
|  | 1. Menyusun RPP yang sesuai dengan standar kompetensi | * *Menurut bapak/ibu guru tersertifikasi sudah dapat menyusun RPP sesuai dengan sintaks model pembelajarannya, dan menyesuaikan dengan KKO serta mengacu kepada HOTS?* * *Menuurt bapak ibu apa yang menjadi kendala (jika ada) bapak/ibu tersertifikasi ini dalam menerapkan pemebalajaran inovatif dengan memanfaatkan TPACK?* * *Apakah bapak/ ibu tersertifikasi ini sudah memenuhi persyartan sertifikasi dengan baik.* * *Bagaimana dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi yang ada disekolah bapak ibu supervisi, apakah sudah berjalan dengan baik?* * *Jika belum apa kendalanya?* |
| 3.  **Kompetensi Kepribadian Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 mengemukakan bahwa kompetensi kepribadian** | | 1. Kepribadian yang disiplin | * *Menurut bapak/ibu apakah bapak/ibu tersertifikasi sudah disiplin dalam menjalankan tugas?* |
| 1. Kepribadian yang bertanggung jawab | * *Menurut bapak/ibu, bapak/ibu tersertifikasi sudah menunjukan rasa bertanggung jawab dengan tugas yang diampuh* |

**LAMPIRAN** F

PROTOKOL WAWANCARA

TERHADAP SISWA

1. Boleh diceritakan, bagaimana pengalaman adik ketika diajar oleh Bapak/Ibu dikelas?
2. Hal menarik apa yang adik ingat ketika diajarkan Bapak/Ibu dikelas?
3. Apakah Bapak/ibu guru sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik menurut adik adik?
4. Apakah adik sudah merasa puas dengan nilai yang diberikan Bapak/ibu Guru tersebut?
5. Boleh di jelaskan, harapan apa yang adik inginkan disaat belajar bersama Bapak/Ibu tersebut?

LAMPIRAN G

PROTOKOL OBSERVASI (Teknik Observasi Terstruktur)

Dalam melakukan penelitian peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Implementasi Kebijakan Sertifikasi terhadap Profesionalitas Guru, Studi Kasus: di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.” Sebagai berikut :

Note : Checklis (√) pada bagian yang di perlukan , sudah terlaksana/ belum terlaksana.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahapan Observasi | Sudah | Belum | Keterangan |
| 1 | Letak geografis sekolah | √ |  |  |
| 2 | Mengamati persiapan guru tersetifikasi sebelum masuk kedalam kelas | √ |  |  |
| 3 | Mengamati ketepatan guru masuk dan keluar kelas | √ |  |  |
| 4 | Mengamati proses kegiatan belajar mengajar guru dikelas | √ |  |  |
| 5 | Mengamati kerja siswa dn siswi dikelas. | √ |  |  |
| 6 | Mengamati media pembelajaran yang digunakan guru | √ |  |  |
| 7 | Mengamati hasil belajar siswa dikelas. | √ |  |  |
| 8 | Mengamati proses evaluasi guru terhadap hasil belajar siswa | √ |  |  |

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

DOKUMENTASI KEADAAN SEKOLAH

****

****

DOKUMENTASI KEADAAN KETIKA KBM





DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PARTISIPAN







\



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Identitas Diri**

Nama : Siti Badriah

Nim : P2A221006

TTL : Jambi, 16 Mei 1991

Alamat : Jl. SM. Malik Ibrahim No.06 Rt. 24 Jambi

No Hp : 087714592521

Email : sitibadriah1605@gmail.com

1. **Latar Belakang Pendidikan**

SD : SDN 13/IV Kota Jambi

SMP : SMP N 10 Kota Jambi

SMA : SMA N 2 Kota Jambi

S1 : Program Studi Bahasa Inggris Universitas Jambi

1. **Pengamalam Kerja**
   1. Customer Service Smartfren Tbk
   2. Supervisor Smartfren Tbk Cab. Jambi dan Tebing Tinggi
   3. Guru Bahasa Inggris SMP N 10 Kota Jambi
   4. Guru Bahasa Inggris SMPN 18 Muaro Jambi
   5. Juru Bayar Gaji SMPN 18 Muaro Jambi
2. **Prestasi**
3. Peraih Mendali Perunggu Teacherlympic PGRI Tingkat Nasional 2020
4. Juara 1 Video Pembelajaran Tingkat SMP Se- Provinsi Jambi 2020
5. Juara Harapan Pembuatan Video Objek Wisata dan Sosok Inspiratif PIGIJO x IGI Se Indonesia 2020
6. Traniner Sagusavi 2020
7. Google Master Trainer 2021
8. Fasda Tanoto Foundation 2021-2022
9. Penulis Buku Ber ISBN 3 Journey

****